



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017



BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

Jln. HOS Cokroaminoto No. 1 Mataram Telp./Fax. (0370) 631954/ (0370)641223

Email : bkdmataramkota@gmail.com; <http://www.mataramkota.go.id>

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu instrumen bagi setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan adalah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan LKIP. Penyusunan LKIP merupakan cerminan sejauh mana kinerja organisasi pemerintah dapat mencapai sasaran dan tujuan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai salah satu unit organisasi Pemerintah Kota Mataram berkewajiban untuk menyusun LKIP 2017 sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penyusunan LKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap sub unit organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Mataram yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021. pada tujuan ke- 1 (pertama) dalam misi ke-5 (lima) yaitu Meningkatkan kualitas layanan publik, dimana sasaran ke 2 (dua) yang ingin dicapai adalah “Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” dan sasaran ke 3 (tiga) yaitu “Terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel”, sedangkan pada tujuan ke-5 (lima) dalam misi ke-4 (empat) yaitu “Meningkatkan efektifitas pengelolaan tanah milik daerah” dimana sasaran ke 1 (pertama) yang ingin dicapai adalah “Terkelolanya aset milik daerah secara tertib sesuai prosedur”.

Secara umum kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dapat dicapai dengan baik walaupun beberapa indikator kinerja belum dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya kegiatan yang diluar kendali internal terkait sasaran tercapainya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sesuai prosedur. Sejalan dengan konsep anggaran berbasis kinerja, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tahun 2017 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran bersumber APBD Kota Mataram dengan total anggaran sebesar Rp. 109.555.741.121,83 dan mengalami perubahan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 139.105.176.096,03 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp. 29.549.434.974,20 Sedangkan realisasi yang dapat dicapai sebesar Rp. 93.396.900.215 atau 67,14%

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram yang diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Mataram Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram disebutkan dalam pasal 2 ayat (3) Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Keuangan daerah Kota Mataram menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan fungsi pejabat keuangan daerah (PPKD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (BUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pertanggungjawaban dalam bentuk penyampaian informasi kinerja merupakan penekanan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan perubahan paradigma bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga segala sumber daya yang tersedia diarahkan kepada usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan ekonomi daerah yang sangat cepat berakibat pada adanya perubahan anggaran pendapatan dan belanja yang pada akhirnya Badan Keuangan Daerah Kota Mataram melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kinerja Tahunan dengan mengacu pada APBD perubahan agar apa yang ditargetkan dapat dicapai dengan *OPTIMAL*.

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fungsi Lakip	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Lakip	2
1.4 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	3
1.5 Sistematika Penyusunan Lakip	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi dan Misi SKPD	8
2.1 Tujuan dan Sasaran	9
2.3 Strategi dan Kebijakan	10
2.4 Program dan Kegiatan	12
2.5 Perjanjian Kinerja	25
2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017	26
2.7 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	27
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja	28
3.3 Capaian Indikator Kinerja	44
3.4 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	47
3.5 Akuntabilitas Keuangan	51
Akuntabilitas Anggaran	58
 BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Komposisi ASN Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.2 Komposisi ASN Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan Pangkat dan Golongan	6
Tabel 1.3 Komposisi ASN dan Tenaga Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 2.1 Tujuan, sasaran ,strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam mendukung Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram Periode 2016-202	11
Tabel 2.2 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2017	15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2017...	25
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	26
Tabel 3.1 Persentase Pelayanan Permohonan Wajib Pajak Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti sesuai SOP.....	29
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram berdasarkan Persentase Pengembangan/ Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah	30
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan Persentase Penyediaan Fasilitas Online Pajak Daerah	30
Tabel 3.4 Hasil Penyusunan Indek Bidang Pendapatan	31
Tabel 3.5 Hasil Penyusunan Indek Bidang Akuntansi dan Pelaporan	32
Tabel 3.6 Hasil Penyusunan Indek Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.....	32
Tabel 3.7 Hasil Penyusunan Indek Bidang Aset.....	33
Tabel 3.8 Pengukuran kinerja berdasarkan Persentase Pendataan dan Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah.....	34
Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja berdasarkan Persentase peningkatan Penetapan Pajak Daerah.....	35
Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Berdasarkan 'Persentase Realisasi Pembayaran Tunggalan Pajak Daerah	35
Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja berdasarkan Persentase peningkatan Penagihan Pajak Daerah (Sistem Self assessment dan Official Assesment).....	36
Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Persentase Wajib Pajak yang menyetorkan Pajak Daerah Tepat Waktu/Sebelum Jatuh Tempo.....	37
Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Persentase Implementasi Peraturan- Peraturan tentang Pajak Daerah yang tersosialisasikan	37
Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Jumlah Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan	38
Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD Pengelola PAD.....	39
Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD.	39
Tabel 3.17 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Persentase Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah.....	40
Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	43
Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja berdasarkan Persentase Sertifikasi Aset Tanah/Bangunan yang dilaksanakan	44
Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	45

Tabel 3.21	Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	47
Tabel 3.22	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	48
Tabel 3.23	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Terkait Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	49
Tabel 3.24	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Terkait Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	49
Tabel 3.25	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Terkait Tercapainya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	50
Tabel 3.26	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Terkait Tercapainya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sesuai prosedur.....	51
Tabel 3.27	Rasio Efektifitas Pendapatan Pajak Daerah.....	52
Tabel 3.28	Rasio Efisiensi Pendapatan Pajak Daerah.....	53
Tabel 3.29	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	54
Tabel 3.30	Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	55
Tabel 3.31	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	56
Tabel 3.32	Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap APBD.....	57
Tabel 3.33	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017.....	58
Tabel 3.34	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Periode Tahun Anggaran 2013-2017).....	62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I : Copy Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2017
- Lampiran II : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
- Lampiran III : Standar Operasional Prosedur Penyusunan LKIP
- Lampiran IV : Copy Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
- Lampiran V : Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
- Lampiran VI : Keselarasan Kinerja – Output – Penganggaran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akhir-akhir ini kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Masyarakat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban *yang* tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran, meskipun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program masih jauh dibawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata pada input (masukan) dari program, melainkan lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat, dan dampaknya.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan instansi pemerintah dapat dilihat dari kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban ini dikenal dengan sebutan LKIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak

yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi/ wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh para pemangku kepentingan guna menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Bagi setiap SKPD, penyusunan LKIP merupakan penterjemahan atas tugas pokok dan fungsi yang diembannya melalui pelaksanaan setiap program/kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian visi melalui misi dan strategi organisasi berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

1.2. Fungsi LKIP

LKIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berfungsi sebagai :

1. Media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi.
2. Media pertanggungjawaban secara tertulis kepada pemberi wewenang dan mandat.
3. Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada pemberi wewenang atas penggunaan anggaran dalam berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Media informasi, tentang sejauh mana penerapan perinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan. Salah satu fungsi manajemen adalah pelaporan, yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi guna menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang harus dilakukan.

1.3. Tujuan dan Manfaat LKIP

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan akuntabilitas SKPD kepada pihak yang memberi mandat/amanah, atau dengan kata lain LKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk mengkomunikasikan tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya dalam kaitannya dengan mandat atau tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Adapun manfaat LKIP bagi SKPD adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas. Hal ini juga akan memberi pengaruh terhadap kredibilitas SKPD yang bersangkutan; semakin akuntabel LKIP SKPD maka semakin kredibel SKPD tersebut.

2. Umpan balik untuk peningkatan kinerja SKPD yang bersangkutan, yang dapat dilakukan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan kinerja hingga pada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas pada lingkungan kerja SKPD.
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban.

1.4. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Mataram

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan fungsi pejabat keuangan daerah (PPKD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (BUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka keberadaan jajaran personil pada Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tersusun sebagai berikut :

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data (P4D) membawahi
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan; dan
 - c. Sub Bidang Pengolahan dan Dokumentasi Data.
 2. Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Restitusi; dan
 - c. Sub Bidang Penagihan.
 3. Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan;
 - b. Sub Bidang Pendapatan Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Akuntansi I;
 - b. Sub Bidang Akuntansi II; dan
 - c. Sub Bidang Akuntansi III.
 5. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Anggaran I;
 - b. Sub Bidang Anggaran II; dan
 - c. Sub Bidang Perbendaharaan.
 6. Bidang Aset, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
 - b. Sub Bidang Pengamanan; dan
 - c. Sub Bidang Penatausahaan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya , Badan Keuangan Daerah Kota Mataram memerlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan amanah. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi ASN yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang

akan dan sedang didudukinya. Mewujudkan profesionalisme dikalangan ASN memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan ASN yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier ASN, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan, sedangkan amanah dimaksudkan pada aspek religius, menyangkut keimanan seluruh aparatur dalam melaksanakan system dan mekanisme pemungutan pajak daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 106 (Seratus Enam) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 30 (tiga puluh) Orang Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Komposisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam susunan suatu organisasi.

Tabel 1.1
Komposisi ASN Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
Berdasarkan Jabatan

No.	Eselon	Formasi	Terisi	Kurang	Jenis Kelamin	
					Laki	Perempuan
1	I a	-	-	-	-	-
2	I b	-	-	-	-	-
3	II a	-	-	-	-	-
4	II b	1	1	-	1	-
5	III a	1	1	-	1	-
6	III b	6	6	-	3	3
7	IV a	21	19	2	11	8
8	IV b	-	-	-	-	-
9	V a	-	-	-	-	-
10	V b	-	-	-	-	-
JUMLAH I		29	27	2	16	11

**Sumber : Data BKD Kota Mataram 2017*

1.2. Komposisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat dan Golongan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

Aparatur Sipil Negara pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram berdasarkan pangkat dan golongan berjumlah 106 orang dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Aparatur Sipil Negara pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Golongan		Jumlah	Jenis Kelamin	
				Laki	Perempuan
1	Pembina Utama	IV	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV.d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV.c	1	1	-
4	Pembina Tingkat I	IV.b	-	-	-
5	Pembina	IV.a	9	6	3
6	Penata Tingkat I	III.d	15	9	6
7	Penata	III.c	19	12	7
8	Penata Muda Tingkat I	III.b	21	9	12
9	Penata Muda	III.a	15	8	7
10	Pengatur Tingkat I	II.d	4	3	1
11	Pengatur	II.c	17	12	5
12	Pengatur Muda Tingkat I	II.b	2	2	-
13	Pengatur Muda	II.a	3	3	-
14	Juru Tingkat I	I.d	-	-	-
15	Juru	I.c	0	0	-
16	Juru Muda Tingkat I	I.b	-	-	-
17	Juru Muda	I.a	-	-	-
JUMLAH I			106	65	41

*Sumber : Data BKD Kota Mataram 2017

1.3. Komposisi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3
Komposisi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)
pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan/Ruang		Pendidikan							
			SD	SLTP	SLTA	D II	DIII	DIV	S1	S2
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Pembina Tingkat I	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pembina	IV/a	-	-	-	-	-	-	4	5
6	Penata Tingkat I	III/d	-	-	-	-	-	-	14	1
7	Penata	III/c	-	-	-	-	1	-	16	2
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	4	-	3	-	12	2
9	Penata Muda	III/a	-	-	2	-	4	1	8	-

10	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-	2	-	2	-	-	-
11	Pengatur	II/c	-	-	16	-	1	-	-	-
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	2	-	-	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	1	2	-	-	-	-	-
14	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PTT	-	1	2	15	-	5	-	6	1
JUMLAH I			1	3	43	0	16	1	60	12

Sumber : Data BKD Kota Mataram, 2017

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram merupakan salah satu Badan dari 47 Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang dibentuk pada tanggal 10 November Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 yang merupakan Penggabungan Dinas Pendapatan Kota Mataram dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram sebagai wujud Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram disamping kedudukannya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

1.5 Sistematika Penyusunan LKIP

Sistematika penyusunan LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tahun 2017 mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang tersusun sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

2.1. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016–2021 adalah “*Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram Yang Maju, Religius, dan Berbudaya*”. Untuk mendukung visi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016–2021, yaitu:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai;
2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan Iptek dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing.
3. Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
4. Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan sarana dan prasarana perkotaan berbasis tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
5. Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dimana, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016–2021 termasuk dalam misi ke 4 (empat) dan misi ke 5 (lima). Pada misi ke 4 (empat) “*Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan sarana dan prasarana perkotaan berbasis tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan*”, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah “*Terkelolanya Aset Milik Daerah secara Tertib sesuai Prosedur*”. Sedangkan pada misi ke 5 (lima) yaitu “*Meningkatkan*

keandalan pelayanan public melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good government)”, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel” serta “Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2016–2021 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan analisa terhadap tantangan dan potensi peluang lima tahun mendatang serta dengan memperhitungkan kondisi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram saat ini, maka Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah dengan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

2.2.1. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

2.2.2. Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan

merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan,

Tujuan dan sasaran jangka panjang maupun jangka pendek yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Mataram pada RPJMD Kota Mataram 2016-2021 *pada tujuan ke- 1 (pertama) dalam misi ke-5 (lima) yaitu Meningkatkan kualitas layanan public, dimana sasaran ke 2 (dua) yang ingin dicapai adalah "Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah" dan sasaran ke 3 (tiga) yaitu "Terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel", sedangkan pada tujuan ke-5 (lima) dalam misi ke-4 (empat) yaitu "Meningkatkan efektifitas pengelolaan tanah milik daerah" dimana sasaran ke 1 (pertama) yang ingin dicapai adalah "Terkelolanya aset milik daerah secara tertib sesuai prosedur".*

2.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Adapun penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih periode 2016-2021 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel : 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BKD Kota Mataram dalam
Mendukung Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Periode 2016-2021

<p style="text-align: center;">VISI KOTA MATARAM : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA</p>				
<p style="text-align: center;">MISI KOTA MATARAM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, RUKUN DAN DAMAI 2. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PENGUASAAN IPTEK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAERAH YANG BERDAYA SAING 3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA 4. MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN 5. MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 				
<p style="text-align: center;">MISI KOTA MATARAM YANG DISELARASKAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM</p>				
<p>MISI KOTA MATARAM YANG KE - IV</p>	<p>MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN</p>			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Prosedur	Tercapainya Tertib Administrasi pengelolaan Aset Daerah Sesuai Prosedur	Meningkatkan Koordinasi dalam Pengelolaan Aset Daerah	Sertifikasi Tanah
			Meningkatkan Akurasi Data Barang Milik Daerah	Keakuratan Data Barang Milik Daerah
<p>MISI KOTA MATARAM YANG KE - V</p>	<p>MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)</p>			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	Melakukan survey terhadap Tingkat Kepuasan Pelayanan
			Meningkatkan Sistim Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dan mengintensifkan Penanganan Pengaduan Pelayanan BKD Kota Mataram	Menindaklanjuti Pengaduan Wajib Pajak dan OPD Secara Tepat Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatkan Pendataan, Pemutakhiran data base, penagihan, Sosialisasi, pengawasan dan pemeriksaan serta Intensifikasi	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
			Memberikan Penghargaan dan Sanksi	Pemberian Penghargaan dan Sanksi Secara Konsisten
		Meningkatnya Koordinasi Pendapatan Asli Daerah dengan Instansi Terkait	Meningkatkan Koordinasi dalam Pengelolaan PAD	Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah
			Meningkatkan Evaluasi PAD dan melaksanakan penelitian dan pengembangan PAD	Peningkatan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD, Meningkatkan Daya Serap APBD dan Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

2.4. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tahun 2017 disusun mengacu pada tujuan dan sasaran serta isu – isu strategis yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tahun 2017.

Program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tahun 2017 direncanakan sebanyak 4 program dengan 64 kegiatan. Dalam perencanaan tersebut terdapat penyesuaian terhadap beberapa program kegiatan, yang dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan isu – isu permasalahan yang berkembang. Pagu indikatif program kegiatan Badan Keuangan Daerah tahun 2017 yang direncanakan adalah sebesar Rp. 84.613.290.280,00 yang bersumber dari APBD Kota Mataram.

Adapun rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 8. Penyediaan Komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 12. Penyediaan Makanan dan Minuman
 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 14. Penyusunan Dokumen Perencanaan
 15. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian dan
 16. Penyediaan Administrasi Keuangan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
1. Pembangunan gedung kantor
 2. pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 3. Pengadaan mebeleur
 4. Pengadaan Tanah
 5. Pengadaan Gedung Kantor
 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram
 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram
 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram
 5. Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
 2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
 4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
 5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah
8. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah
10. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
11. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
12. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD
13. Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)
14. Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
15. Peningkatan Management Penagihan Pajak/Retribusi Daerah
16. Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
17. Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan
18. Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi
19. Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah
20. Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah
21. Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah
22. Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah
23. Penghapusan Barang Milik Daerah
24. Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
25. Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah
26. Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
27. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah
28. Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrua
29. Pemindahtanganan BMD
30. Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah
31. Bimbingan Teknis Implementasi SAP Akrua dengan Aplikasi Simda
32. Peningkatan Penghapusan Piutang Daerah
33. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat
34. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
35. Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
36. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram*

2017

TABEL : 2.2
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017

KODE REKENING					TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2017	
										TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8
											84.613.290.280,00
4.04	4.04	01.02	01		Menciptakan Sistem Administrasi Perkantoran Yang Lancar, Tertib Dan Teratur Serta Dapat Dipertanggung Jawabkan Sesuai Aturan Yang Berlaku.	Penyediaan Jasa Dan Fasilitas Untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran.	Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Lancar, Tertib Dan Teratur Serta Dapat Dipertanggung Jawabkan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Lancar, Tertib Dan Teratur Serta Dapat Dipertanggungjawabkan	100%	6.466.260.000
4.04	4.04	01.02	01	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2300 Lembar Materai	10.275.000,00
4.04	4.04	01.02	01	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	4 Rekening	470.700.000,00
4.04	4.04	01.02	01	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai	10 Jenis peralatan kantor	86.550.000,00



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram*

2017

4.04	4.04	01.02	01	06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Oprasional	12 unit R-4 dan 47 unit R-2	157.125.000,00
4.04	4.04	01.02	01	08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Cleaning Service	1 Paket	201.250.000,00
4.04	4.04	01.02	01	10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	286.630.000,00
4.04	4.04	01.02	01	11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis Barang Cetak	229.180.000,00
4.04	4.04	01.02	01	12				Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	25.000.000,00
4.04	4.04	01.02	01	13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	2.079.350.000,00
4.04	4.04	01.02	01	14				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2 Jenis bahan pembersih	27.500.000,00
4.04	4.04	01.02	01	15				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar, peraturan pajak daerah dan Profil Dispenda kota Mataram	3 jenis Bahan Bacaan	289.700.000,00
4.04	4.04	01.02	01	17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan Kegiatan	7250 kotak	320.625.000,00



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram*

2017

4.04	4.04	01.02	01	18				Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terwujudnya kelancaran dan terkoordinasinya pelaksanaan tugas dinas	1 Tahun	520.000.000,00
4.04	4.04	01.02	01	19				Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya RKA, DPA, DPPA, Renstra dan Laporan Mandiri LPPD	10 Jenis Dokumen	47.725.000,00
4.04	4.04	01.02	01	20				Penyediaan Jasa Administrasi Umum Kepegawaian	Tersedianya Jasa Tenaga Tidak Tetap/Non PNSD	40 Orang Tenaga Non PNSD	607.800.000,00
4.04	4.04	01.02	01	26				Penyediaan Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan	66 orang tenaga administrasi	1.106.850.000,00
4.04	4.04	01.02	02		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Serta Fasilitas Yang Memadai Untuk Menunjang Pelaksanaan Tupoksi.	Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur.	Terwujudnya Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Serta Fasilitas Yang Memadai	100%	60.779.263.655,00
4.04	4.04	01.02	02	03				Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gudang kendaraan dan pembangunan gedung kantor	2 Paket	1.038.750.000,00
4.04	4.04	01.02	02	05				Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	12 Unit Kendaraan	3.824.350.000,00



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram*

2017

4.04	4.04	01.02	02	10				Pengadaan Meublair	Tersedianya Mebeleur Kantor	1 kegiatan	185.908.655,00
4.04	4.04	01.02	02	11				Pengadaan Tanah	Terlaksanannya pengadaan tanah dan sertifikasi untuk bangunan tempat kerja maupun keperluan lainnya	5 paket	54.899.135.000,00
4.04	4.04	01.02	02	12				Pengadaan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan sewa gedung kantor lurah	1 Tahun	500.000.000,00
4.04	4.04	01.02	02	22				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	35.000.000,00
4.04	4.04	01.02	02	24				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	12 unit R-4 dan 38 unit R-2	296.120.000,00
4.04	4.04	01.02	06		Pelaksanaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Sistematis, Transparan, Dan Akuntabel.	Penyediaan Laporan Atas Capaian Kinerja Dan Keuangan Secara Sistematis, Transparan, Dan Akuntabel.	Terwujudnya Laporan Atas Capaian Kinerja Dan Keuangan Secara Sistematis, Transparan Dan Akuntabel	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Terciptanya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Baik Dan Benar	100%	136.150.000,00
4.04	4.04	01.02	06	1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi Kinerja SKPD	Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan benar	100%	136.150.000,00



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram*

2017

4.04	4.04	01.02	06	11				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran kota mataram	1 Dokumen	19.000.000,00
4.04	4.04	01.02	06	12				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram	Tersusunnya laporan prognosis Pemerintah Kota Mataram	1 Dokumen	5.000.000,00
4.04	4.04	01.02	06	13				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Kota Mataram	1 Dokumen	88.850.000,00
4.04	4.04	01.02	06	14				Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram	Tersusunnya neraca awal pemerintah Kota Mataram	100 %	23.300.000,00
4.04	4.04	01.07	15		Peningkatan Efektifitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.	Tercapainya Target Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Terwujudnya Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	17.231.616.625,00
4.04	4.04	01.07	15	'06				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	5 Dokumen	704.750.000,00
4.04	4.04	01.07	15	07				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	5 Dokumen	191.790.000,00



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram*

2017

4.04	4.04	01.07	15	08				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersediaanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen	184.750.000,00
4.04	4.04	01.07	15	09				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH dan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	2 dokumen	131.900.000,00
4.04	4.04	01.07	15	10				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	317.185.000,00
4.04	4.04	01.07	15	11				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	70.130.000,00
4.04	4.04	01.07	15	12				Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah	Tersedianya data asset Pemerintah Kota Mataram	1 Dokumen	799.887.500,00
4.04	4.04	01.07	15	13				Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	349.800.000,00
4.04	4.04	01.07	15	14				Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah	100 %	47.885.000,00
4.04	4.04	01.07	15	18				Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Terdatanya Barang Milik Daerah Kota Mataram	100 %	319.200.000,00



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram*

2017

4.04	4.04	01.07	15	19				Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	10 Jenis Pajak Daerah	105.000.000,00
4.04	4.04	01.07	15	20				Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD	Terselenggaranya pembahasan RKA dan DPA SKPD	2 Kegiatan	99.850.000,00
4.04	4.04	01.07	15	22				Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)	Terselenggaranya pelayanan Bendahara Umum Daerah	11000 SP2D	675.650.000,00
4.04	4.04	01.07	15	24				Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pendataan pajak Daerah	10Jenis Pajak daerah	110.200.000,00
4.04	4.04	01.07	15	26				Peningkatan Management Penagihan Pajak/Retribusi Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak dan Tunggakan Pajak Daerah	10 Jenis Pajak Daerah	210.812.500,00
4.04	4.04	01.07	15	28				Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Terlaksananya Kegiatan Gebyar dan Penagihan PBB-P2 Kota Mataram	75 000 Wajib Pajak PBB	4.680.221.725,00
4.04	4.04	01.07	15	31				Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan	Tersusunnya produk-produk hukum bidang keuangan pada BKD Kota Mataram	3 produk hukum	168.025.000,00
4.04	4.04	01.07	15	34				Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah	100 %	181.450.000,00



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram*

2017

4.04	4.04	01.07	15	38				Sosialisasi Peraturan- Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak Daerah	10 Jenis Pajak Daerah	921.620.000,00
4.04	4.04	01.07	15	43				Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Terlaksananya Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	10 Jenis Pajak Daerah	604.800.000,00
4.04	4.04	01.07	15	45				Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah	10 Jenis Pajak Daerah	535.780.000,00
4.04	4.04	01.07	15	46				Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah	10 Jenis Pajak Daerah	298.540.000,00
4.04	4.04	01.07	15	49				Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penghapusan barang inventaris milik daerah	100 %	237.850.000,00
4.04	4.04	01.07	15	54				Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan Barang milik Daerah	85 % dari capaian program	1.089.200.000,00
4.04	4.04	01.07	15	55				Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya peningkatan penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Kegiatan	629.350.000,00
4.04	4.04	01.07	15	56				Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya BinteK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	249.750.000,00



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram*

2017

4.04	4.04	01.07	15	57				Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah secara Optimal	10 Jenis Pajak Daerah	300.890.000,00
4.04	4.04	01.07	15	58				Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrua	Terselenggaranya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	245.600.000,00
4.04	4.04	01.07	15	59				Pemindahtanganan BMD	Terselenggaranya kegiatan pemindahtanganan Barang Milik Daerah	100 %	303.150.000,00
4.04	4.04	01.07	15	60				Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terciptanya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	150.000.000,00
4.04	4.04	01.07	15	61				Bimbingan Teknis Implementasi SAP Akrua dengan Aplikasi Simda	Terwujudnya Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	42.349.900,00
4.04	4.04	01.07	15	63				Peningkatan Penghapusan Piutang Daerah	Terlaksananya program peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah	100 %	74.000.000,00
4.04	4.04	01.07	15	64				Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat	Terpenuhinya pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat	1 kegiatan	20.000.000,00



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram*

2017

4.04	4.04	01.07	15	65				Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	10 Jenis Pajak Daerah	442.900.000,00
4.04	4.04	01.07	15	66				Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah	10 Jenis Pajak Daerah	545.350.000,00
4.04	4.04	01.07	15	73				Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa	100 %	1.192.000.000,00

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sehingga terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam upaya pencapaian tujuan melalui sasaran strategis yang ditetapkan, telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 yang disajikan pada tabel 2.3. berikut ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2017

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) terhadap Pelayanan Badan keuangan Daerah Kota Mataram	65
2	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target Penerimaan Pajak Daerah	5% dari Tahun Sebelumnya
		Persentase Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Hasil Koordinasi	100%
3	Tercapainya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Persentase Daya Serap APBD	92,50%
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100%
4	Tercapainya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Daerah sesuai Prosedur	Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah memiliki sertifikat	43,83%
		Persentase kealutran Data Barang Milik Daerah	100%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 6.466.260.000,00	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 60.779.263.655,00	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 136.150.000,00	
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 17.231.616.625,00	
		Rp. 84.613.290.280,00	

2.6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Sebagai penjabaran dari Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021, maka Badan Keuangan Daerah Kota Mataram menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2017. RKT Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2017 semula disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2017 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017, mengacu kepada rencana strategis periode 2016-2021. Adapun RKT Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel 2.2 berikut ini :

Tabel : 2.4
Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
Tahun Anggaran 2017

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	65
2.	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target Penerimaan Pajak Daerah	5 % dari tahun sebelumnya
		Persentase Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Hasil Koordinasi	100%
3.	Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Persentase Daya Serap APBD	92,50%
		Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100 %
4	Tercapainya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sesuai prosedur	Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah memiliki Sertifikat	43,83%
		Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban OPD terhadap pencapaian sasaran pada tahun berjalan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui perbandingan antara target dan pencapaian realisasi

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat, selain mengacu pada ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Mataram juga memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016–2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis tersebut perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator). Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Perlunya ditetapkan Indikator Kinerja Utama adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh pelaksana dan pimpinan organisasi dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi

Capaian Indikator Kinerja Utama diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d < 70 : Cukup Berhasil

0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dimulai dari proses pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengukuran kinerja mencakup pengukuran pencapaian kinerja yang tertuang dalam Cascading Kinerja Badan Keuangan Daerah dan pada Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Mataram serta pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam penetapan kinerja. Pengukuran diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dan

membandingkannya dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, belum semua data kinerja yang diperlukan dapat dipenuhi secara tepat waktu.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah direncanakan dengan target yang telah direalisasikan pada tahun tersebut.

Adapun Data Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2017, secara rinci dijabarkan dalam beberapa tabel sebagai berikut :

A. Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik

Pengukuran kinerja pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tahun 2017 didasarkan pada persentase pelayanan permohonan wajib pajak daerah dan organisasi perangkat daerah, Persentase Pengembangan/pemeliharaan sistem Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta Persentase Penyediaan Fasilitas Online Pajak Daerah yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.1
Persentase Pelayanan Permohonan Wajib Pajak Daerah dan
Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti sesuai SOP

No.	Kegiatan	Pengukuran	Jumlah Pelayanan kepada Wajib Pajak dan OPD	Ket
1	Pelayanan permohonan wajib pajak daerah	Target	70.000	WP
		Realisasi	127.210	WP
		Capaian	182%	
2	Penanganan Pengaduan Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah	Target	250	WP
		Realisasi	394	WP
		Capaian	157,6%	
3	'Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)	Target	10.000	SP2D
		Realisasi	9355	SP2D
		Capaian	83,33%	
4	Pelayanan Anggaran Satuan Kerja	Target	2	Dokumen
		Realisasi	2	Dokumen
		Capaian	100%	
5	Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Target	7	Laporan
		Realisasi	7	Laporan
		Capaian	100%	
6	Pelayanan Rekonsiliasi BMD	Target	468	Berita acara
		Realisasi	82	Berita acara
		Capaian	17,52%	
Rata-Rata Capaian			94,89%	

Tabel : 3.2

Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram berdasarkan
Persentase Pengembangan/ Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah

No.	Kegiatan	Pengukuran	Jumlah	Keterangan
1	Kegiatan Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Pajak Daerah yang dilaksanakan	Target	12	
		Realisasi	12	
		Capaian	100%	
2	Kegiatan Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan	Target	12	
		Realisasi	12	
		Capaian	100%	
3	Kegiatan Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIMDA BMD) yang dilaksanakan	Target	12	
		Realisasi	12	
		Capaian	100%	
Rata-Rata Capaian			100%	

*

Tabel : 3.3

Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan
Persentase Penyediaan Fasilitas Online Pajak Daerah

No.	Kegiatan	Pengukuran	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Fasilitas On line Jenis Pajak daerah yang disediakan: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. PBB-P2	Target	3	
		Realisasi	3	
		Capaian	100%	
Rata-Rata Capaian			100%	

Berdasarkan data pengukuran kinerja pelayanan di atas dapat dilihat bahwa persentase Pelayanan Permohonan Wajib Pajak Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti sesuai SOP menunjukkan tingkat pencapaian yang baik hal ini dibuktikan dengan persentase capaian pada Pelayanan permohonan wajib pajak daerah sebesar 182%, persentase Pelayanan Anggaran Satuan Kerja sebesar 100%, dan Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah sebesar 100%. Sedangkan pada persentase 'Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjukkan 83,33%, persentase Penanganan Pengaduan Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah sebesar 157,6%, artinya semakin besar jumlah penanganan keberatan dan restitusi pajak daerah yang dilakukan maka kinerja pelayanan menjadi kurang baik, begitu pula halnya dengan Persentase Pelayanan Rekonsiliasi BMD sebesar 17,52%, hal ini

disebabkan karena pelaksanaan rekonsiliasi BMD dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun anggaran.

Pengukuran Kinerja Pengembangan/ pemeliharaan sistem Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Persentase Penyediaan Fasilitas Online Pajak Daerah menunjukkan tingkat pencapaian yang baik dengan tingkat capaian 100% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk mengukur kinerja terkait Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak daerah dan Organisasi perangkat daerah yang hasil pengukurannya dijabarkan sebagai berikut

Tabel : 3.4
Hasil Penyusunan Index Bidang Pendapatan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Kesopanan dan Keramahan Petugas	2,84	BAIK
2	Kemampuan petugas Pelayanan	3,04	BAIK
3	Prosedur Pelayanan	2,81	BAIK
4	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	2,66	BAIK
5	Persyaratan Pelayanan	3,03	BAIK
6	Kenyamanan Lingkungan	2,48	TIDAK BAIK
7	Kejelasan Petugas Pelayanan	2,70	BAIK
8	Keamanan pelayanan	2,75	BAIK
9	Kecepatan Pelayanan	2,56	BAIK
10	Kepastian Biaya Pelayanan	2,86	BAIK
11	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	2,85	BAIK
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	2,99	BAIK
13	Kewajaran Biaya Pelayanan	2,95	BAIK
14	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	2,94	BAIK
NILAI RATA-RATA INDEKS		2,80	
NILAI RATA-RATA IKM SETELAH Dikonversi (X 25)		70,06	
MUTU PELAYANAN		B	
KINERJA PELAYANAN		BAIK	

Tabel : 3.5
Hasil Penyusunan Index Bidang Akuntansi dan Pelaporan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Kesopanan dan Keramahan Petugas	2,71	BAIK
2	Kemampuan petugas Pelayanan	2,88	BAIK
3	Prosedur Pelayanan	2,72	BAIK
4	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	2,60	BAIK
5	Persyaratan Pelayanan	2,75	BAIK
6	Kenyamanan Lingkungan	2,53	BAIK
7	Kejelasan Petugas Pelayanan	2,59	BAIK
8	Keamanan pelayanan	2,74	BAIK
9	Kecepatan Pelayanan	2,38	TIDAK BAIK
10	Kepastian Biaya Pelayanan	2,61	BAIK
11	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	2,60	BAIK
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	2,64	BAIK
13	Kewajaran Biaya Pelayanan	2,61	BAIK
14	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	2,71	BAIK
NILAI RATA-RATA INDEKS		2,63	
NILAI RATA-RATA IKM SETELAH DIKONVERSI (X 25)		65,81	
MUTU PELAYANAN		B	
KINERJA PELAYANAN		BAIK	

Tabel : 3.6
Hasil Penyusunan Index Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Kesopanan dan Keramahan Petugas	2,66	BAIK
2	Kemampuan petugas Pelayanan	2,87	BAIK
3	Prosedur Pelayanan	2,72	BAIK
4	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	2,56	BAIK
5	Persyaratan Pelayanan	2,75	BAIK
6	Kenyamanan Lingkungan	2,48	TIDAK BAIK
7	Kejelasan Petugas Pelayanan	2,51	BAIK
8	Keamanan pelayanan	2,66	BAIK
9	Kecepatan Pelayanan	2,34	TIDAK BAIK
10	Kepastian Biaya Pelayanan	2,57	BAIK
11	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	2,56	BAIK
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	2,62	BAIK
13	Kewajaran Biaya Pelayanan	2,61	BAIK
14	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	2,72	BAIK
NILAI RATA-RATA INDEKS		2,60	
NILAI RATA-RATA IKM SETELAH DIKONVERSI (X 25)		65,02	
MUTU PELAYANAN		B	
KINERJA PELAYANAN		BAIK	

Tabel : 3.7
Hasil Penyusunan Indeks Bidang Aset

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Kesopanan dan Keramahan Petugas	2,92	BAIK
2	Kemampuan petugas Pelayanan	3,24	BAIK
3	Prosedur Pelayanan	3,00	BAIK
4	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	2,78	BAIK
5	Persyaratan Pelayanan	3,03	BAIK
6	Kenyamanan Lingkungan	2,46	TIDAK BAIK
7	Kejelasan Petugas Pelayanan	2,70	BAIK
8	Keamanan pelayanan	2,76	BAIK
9	Kecepatan Pelayanan	2,46	TIDAK BAIK
10	Kepastian Biaya Pelayanan	2,78	BAIK
11	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	2,76	BAIK
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	2,97	BAIK
13	Kewajaran Biaya Pelayanan	2,95	BAIK
14	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	2,95	BAIK
NILAI RATA-RATA INDEKS		2,82	
NILAI RATA-RATA IKM SETELAH DIKONVERSI (X 25)		70,57	
MUTU PELAYANAN		B	
KINERJA PELAYANAN		BAIK	

Berdasarkan data hasil penyusunan indeks 24 (dua puluh empat) jenis pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai IKM
1	Hasil Penyusunan Indeks Bidang Pendapatan	70,06
2	Hasil Penyusunan Indeks Bidang Akuntansi dan Pelaporan	65,81
3	Hasil Penyusunan Indeks Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	65,02
4	Hasil Penyusunan Indeks Bidang Aset	70,57
JUMLAH		271,46
RATA-RATA HASIL PENYUSUNAN INDEKS		67,87
MUTU PELAYANAN		B
KINERJA PELAYANAN		Baik
TARGET		65
PERSENTASE (REALIASASI/TARGET) X 100%		104,42%

B. Pengukuran Kinerja Pendapatan Asli Daerah

Pengukuran Kinerja Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai pengelola pajak daerah dan sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah. Adapun Pengukuran kinerja pendapatan asli daerah yang didasarkan pada fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai Pengelola Pajak Daerah dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.8
Pengukuran kinerja berdasarkan
Persentase Pendataan dan Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola	Hasil Pendataan WP Tahun 2017				Keterangan
		Validasi Data Base Pajak Daerah Tahun 2016	Jumlah WP Terdata Tahun ini	Jumlah WP s/d Tahun ini	Validasi Data Base Pajak Daerah Tahun 2017	
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7
1	Pajak Hotel	131	12	143	137	
2	Pajak Restoran	413	102	515	450	
3	Pajak Hiburan	48	7	55	45	
4	Pajak Parkir	22	55	77	73	
5	Pajak Air Tanah	119	9	128	97	
6	Pajak Sarang Burung Walet	57		57	57	
7	BPHTB	1392		1392	1797	
8	PBB	74733	1298	74733	76255	
9	Pajak Reklame	1827		1827	1465	
10	Pajak Penerangan Jalan	1		1	1	
TOTAL		78743	1483	78928	80377	
TARGET			950		70000	
CAPAIAN			156,11%		114,81%	

Berdasarkan data pengukuran kinerja Persentase Pendataan dan Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah di atas dapat dilihat bahwa persentase capaiannya sebesar 114,81% untuk pengukuran kinerja pendataan pajak daerah, sedangkan untuk persentase wajib pajak baru yang terdata sebesar 156,11%. Hal ini menunjukkan tingkat pencapaian yang baik.

Tabel : 3.9

Pengukuran Kinerja berdasarkan
Persentase Penetapan Pajak Daerah

No.	Kegiatan	Pengukuran	Jumlah Penetapan WP Yang Dilaksanakan		Keterangan
			2016	2017	
1	Penerbitan SKPD	Target	2.800	2.900	
		Realisasi	2.903	2.572	
		Capaian	104%	89%	
2	Penerbitan SKPDKB	Target	100	150	
		Realisasi	159	151	
		Capaian	159%	101%	
3	Penerbitan SPPT PBB	Target	75.263	76.225	
		Realisasi	70470	69.903	
		Capaian	94%	92%	
TOTAL		Target	78.163	79.275	
		Realisasi	73.532	72.626	
		Capaian	94%	92%	

Tabel : 3.10

Pengukuran Kinerja Berdasarkan
'Persentase Realisasi Pembayaran Tunggakan Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola	Tunggakan			Persentase (%)	Ket
		Target	Realisasi	Selisih (+ /-)		
1	Pajak Hotel	2.284.592.814	263.877.814	2.020.715.000	12%	
2	Pajak Restoran	618.551.528		618.551.528	0%	
3	Pajak Hiburan				0%	
4	Pajak Parkir				0%	
5	Pajak Air Tanah	194.518.777	29.332.913	165.185.864	15%	
6	Pajak Sarang Burung Walet				0%	
7	BPHTB				0%	
8	PBB	14.137.959.229	7.023.769.219	7.114.190.010	50%	
9	Pajak Reklame	654.289.310	74.182.628	580.106.682	11%	
10	Pajak Penerangan Jalan				0%	
TOTAL		17.889.911.658	7.391.162.574	10.498.749.084	41%	-

Berdasarkan data pengukuran kinerja terkait 'Persentase Realisasi Pembayaran Tunggakan Pajak Daerah dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja menunjukkan persentase sebesar 41%, Hal ini dapat dilihat dari realisasi pembayaran Tunggakan melalui Pajak Hotel, pajak Restoran, pajak air tanah, PBB-P2 dan pajak Reklame dengan total realisasi sebesar 7.391.162.574,-. Sehingga sisa tunggakan sampai dengan tahun 2017 sebsar Rp. 10.498.749.084,-

Tabel : 3.11
Pengukuran Kinerja berdasarkan
Persentase peningkatan Penagihan Pajak Daerah
(Sistem Self assessment dan Official Assesment)

No.	Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola	Pengukuran	Realisasi Penerimaan		Keterangan
			Tahun 2016	Tahun 2017	
1	Pajak Hotel	Target	20.000.000.000	26.000.000.000	
		Realisasi	22.122.172.263	23.467.875.800	
		Capaian	110,61%	90,26%	
		Peningkatan	-6,43%	6,08%	
2	Pajak Restoran	Target	16.000.000.000	23.300.000.000	
		Realisasi	17.507.584.773	22.447.505.227	
		Capaian	109,42%	96,34%	
		Peningkatan	53,06%	28,22%	
3	Pajak Hiburan	Target	3.500.000.000	4.000.000.000	
		Realisasi	3.840.269.858	4.214.542.162	
		Capaian	109,72%	105,36%	
		Peningkatan	161,84%	9,75%	
4	Pajak Parkir	Target	1.000.000.000	2.042.000.000	
		Realisasi	1.175.475.830	1.740.961.125	
		Capaian	117,55%	85,26%	
		Peningkatan	78,06%	48,11%	
5	Pajak Air Tanah	Target	480.000.000	500.000.000	
		Realisasi	506.441.694	607.718.266	
		Capaian	105,51%	121,54%	
		Peningkatan	60,81%	20,00%	
6	Pajak Sarang Burung Walet	Target	5.000.000	5.000.000	
		Realisasi	300.000	800.000	
		Capaian	6,00%	16,00%	
		Peningkatan	-76,92%	166,67%	
7	BPHTB	Target	20.000.000.000	21.000.000.000	
		Realisasi	20.665.333.762	26.605.602.196	
		Capaian	103,33%	126,69%	
		Peningkatan	8,48%	28,75%	
8	PBB	Target	22.000.000.000	24.000.000.000	
		Realisasi	21.273.580.935	24.375.380.703	
		Capaian	96,70%	101,56%	
		Peningkatan	16,09%	14,58%	
9	Pajak Reklame	Target	2.500.000.000	4.000.000.000	
		Realisasi	2.761.600.946	2.467.694.745	
		Capaian	110,46%	61,69%	
		Peningkatan	6,31%	-10,64%	
10	Pajak Penerangan Jalan	Target	36.000.000.000	37.250.000.000	
		Realisasi	34.555.137.743	38.938.591.374	
		Capaian	95,99%	104,53%	
		Peningkatan	13,01%	12,69%	
TOTAL		Target	121.485.000.000	142.097.000.000	
		Realisasi	124.407.897.804	144.866.671.598	
		Capaian	102,41%	101,95%	
		Peningkatan	28,46%	16,44%	

Berdasarkan data pengukuran kinerja terkait Persentase peningkatan Penagihan Pajak Daerah dapat dilihat pada capaian kinerja yang menunjukkan persentase capaian sebesar 101,95%, artinya terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 16,44% atau naik 11,44% dari target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2017.

Tabel : 3.12
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Persentase
Wajib Pajak yang Menyetorkan Pajak Daerah Tepat Waktu/Sebelum Jatuh Tempo

No.	Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola	Tahun			Keterangan
		2015	2016	2017	
1	Pajak Hotel	458	466	563	
2	Pajak Restoran	411	413	501	
3	Pajak Hiburan	42	48	52	
4	Pajak Parkir	24	22	28	
5	Pajak Air Tanah	112	119	122	
6	Pajak Sarang Burung Walet	48	57		
7	BPHTB	2229	1970	1081	
8	PBB	34579	51632	63081	
9	Pajak Reklame	1245	1827	668	
10	Pajak Penerangan Jalan	1	1	1	
TOTAL		39148	56554	66097	
TARGET		45000	65000	87968	
CAPAIAN (%)		87,00%	87,01%	75,14%	

Berdasarkan data pengukuran kinerja terkait Persentase Wajib Pajak yang Menyetorkan Pajak Daerah Tepat Waktu/Sebelum Jatuh Tempo dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja menunjukkan persentase sebesar 75,14%, artinya perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

Tabel : 3.13
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Persentase Implementasi
Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah yang tersosialisasikan

No.	Kegiatan	Pengukuran	2017	Keterangan
1	Kegiatan Sosialisasi Penyampaian SPPT PBB-P2 Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 pada Tanggal 6 April 2017	Target	6 Kecamatan	
		Realisasi	6 Kecamatan	
		Capaian	100%	
2	Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah (Pajak Parkir) Kota Mataram Tahun 2017, Tanggal 8 Juni 2017	Target	1 Kegiatan	
		Realisasi	1 Kegiatan	
		Capaian	100%	

3	Sosialisasi Pajak Daerah (Pemasangan Alat Pengawas an Pajak) Tanggal 24 Agustus 2017	Target	1 Kegiatan	
		Realisasi	1 Kegiatan	
		Capaian	100%	
4	Sosialisasi PBB-P2 dan BBNKB Kota Mataram Tahun 2017 Tanggal 27 Oktober 2017	Target	322 Lingkungan	
		Realisasi	322 Lingkungan	
		Capaian	100%	
5	Sosialisasi Final Pemasangan Alat Pengawasan Pajak Daerah Kota Mataram Tanggal 26 Oktober 2017	Target	1 Kegiatan	
		Realisasi	1 Kegiatan	
		Capaian	100%	
6	Bimbingan Teknis Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2017 Tanggal 30 November 2017	Target	1 Kegiatan	
		Realisasi	1 Kegiatan	
		Capaian	100%	
7	Sosialisasi Pajak daerah Melalui Media Massa Pajak Daerah Tahun 2017	Target	15 Kegiatan	
		Realisasi	15 Kegiatan	
		Capaian	100%	

Tabel : 3.14
Pengukuran Kinerja Berdasarkan
Jumlah Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan

No.	Kegiatan	Target	Realisasi		Persentase (%)	Ket
1	Pajak Hotel	25 Kegiatan	25 Kgt/ 85BAP	2.963.297.122	100%	
2	Pajak Restoran	33 Kegiatan	33 Kgt/ 97 BAP	686.571.178	100%	
3	Pajak Hiburan	9 Kegiatan	7 Kgt/ 25 BAP	621.435.849	78%	
4	Pajak Parkir	5 Kegiatan	1 Kgt/ 3 BAP	59.685.084	20%	
Total		72 Kegiatan/ 216 BAP	66 Kegiatan/210 BAP	4.330.989.233	97,22%	

Sedangkan Pengukuran Kinerja Pendapatan Asli Daerah yang didasarkan pada fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah pengukurannya dilakukan dengan melihat hasil pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola PAD terkait penetapan Target PAD Kota Mataram yang bersumber dari Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,

Tabel : 3.15
Pengukuran Kinerja Berdasarkan
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD Pengelola PAD

No.	Kegiatan Koordinasi PAD	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Persentase (%)	Keterangan
1	Pembahasan Terkait Prediksi Target PAD TA. 2017 dan Perubahan Target PAD TA. 2016	Rabu, 22 April 2016	Aula Dinas Pendapatan Kota Mataram	100%	
2	Rapat Pembahasan Terkait Prediksi Target PAD TA. 2017	Selasa, 11 Oktober 2016	Aula Dinas Pendapatan Kota Mataram	100%	
3	Pembahasan Terkait Prediksi Perubahan Target PAD TA. 2017 dan Prediksi Target 2018	Kamis, 19 April 2017	BKD Kota Mataram	100%	
4	Pembahasan Terkait Prediksi Perubahan Target PAD TA. 2017	Kamis, 14 September 2017	Pendopo Walikota Mataram	100%	
5	Perubahan Target PAD TA 2017 dan Prediksi Target PAD TA. 2018	Tanggal 18 Oktober 2017	BKD Kota Mataram	100%	
7	Prediksi Target PAD TA 2018	Tanggal 7 Desember 2017	BKD Kota Mataram	100%	

Tabel : 3.16
Pengukuran Kinerja Berdasarkan
Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Ket
1	Evaluasi dan Pelaporan PAD Bulan Januari	1 Kegiatan	1 Kegiatan 15.056.738.830	100%	
2	Evaluasi dan Pelaporan PAD Bulan Februari	1 Kegiatan	1 Kegiatan 21.525.030.423	100%	
3	Evaluasi dan Pelaporan PAD Bulan Maret	1 Kegiatan	1 Kegiatan 23.593.200.704	100%	
4	Evaluasi dan Pelaporan PAD Bulan April	1 Kegiatan	1 Kegiatan 28.704.308.502	100%	
5	Evaluasi dan Pelaporan PAD Bulan Mei	1 Kegiatan	1 Kegiatan 15.798.076.292	100%	
6	Evaluasi dan Pelaporan PAD Bulan Juni	1 Kegiatan	1 Kegiatan 26.097.864.222	100%	
7	Evaluasi dan Pelaporan PAD Bulan Juli	1 Kegiatan	1 Kegiatan 26.588.814.140	100%	

8	Evaluasi dan Pelaporan PAD Bulan Agustus	1 Kegiatan	1 Kegiatan 43.739.061.478	100%	
9	Evaluasi dan Pelaporan PAD Bulan September	1 Kegiatan	1 Kegiatan 27.379.883.958	100%	
10	Evaluasi dan Pelaporan PAD Bulan Oktober	1 Kegiatan	1 Kegiatan 18.553.831.085	100%	
11	Evaluasi dan Pelaporan PAD Bulan November	1 Kegiatan	1 Kegiatan 69.941.980.271	100%	
12	Evaluasi dan Pelaporan PAD Bulan Desember	1 Kegiatan	1 Kegiatan 13.753.242.726	100%	

Tabel : 3.17
Pengukuran Kinerja Berdasarkan
Persentase Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
2.	Penyusunan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
3	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
4	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
5	Penyusunan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
6	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
7	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
8	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
9	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%

10	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
11	Penyusunan Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
12	Penyusunan Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
13	Penyusunan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
14	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Air tanah	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
15	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
16	Penyusunan Perubahan Atas Peraturan Walikota mataram nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
17	Penyusunan Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
18	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
19	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
20	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluwarsa	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
21	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%

22	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
23	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
24	Penyusunan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
25	Penyusunan atas Peraturan Walikota Mataram nomor 35 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
26	Penyusunan Peraturan Walikota Mataram tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
27	Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Walikota Mataram tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan/atau Pajak Daerah Lainnya dari Pemohon Layanan Publik Tertentu	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%
28	Penyusunan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	100%

**Sumber data : BKD Kota Mataram:2017*

Berdasarkan data hasil Pengukuran kinerja Pendapatan Asli daerah yang didasarkan pada fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai pengelola pajak daerah dapat disimpulkan bahwa persentase peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar 16,44% dari target yang telah ditetapkan sebesar 5% sehingga terjadi peningkatan sebesar 11,44%. Pada fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai Koordinator PAD menunjukkan bahwa persentase koordinasi terhadap sumber-sumber PAD yang dikelola mengalami peningkatan yang baik, sedangkan terhadap persentase evaluasi dan pelaporan PAD serta penelitian dan pengembangan

pendapatan daerah menunjukkan hasil yang baik dengan terlaksananya evaluasi dan pelaporan PAD serta terlaksananya penyusunan 28 Rancangan Peraturan-peraturan tentang pajak daerah.

C. Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada tiga indikator yaitu Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase Daya serap APBD dan Persentase Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah Kota Mataram, mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Walikota. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan

dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

I. Entitas Akuntansi (OPD), terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

II. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Mataram memasuki tahun ke 3 pada tahun 2017 ini, Salah satu indikator keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2016, sebagaimana disajikan dalam lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram ini.

Dalam upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka langkah-langkah dan upaya-upaya Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrual antara lain :

- 1) Melakukan Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Akrual
- 2) Mengintensifkan Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual kepada OPD;
- 3) Melakukan Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Mataram

Selain upaya-upaya dalam menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrua, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram melalui Pelaksanaan program dan kegiatan, juga telah menyusun agenda kerja sebagai tolak ukur dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang tepat waktu, yaitu sebagai berikut :

Tabel : 3.18
Agenda Kerja Penyusunan Laporan Keuangan dan
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Menyusun Laporan Bulanan sebagai bahan elektronik Audit kerjasama dengan BPKRI Perwakilan Peopinsi NTB data yang dibutuhkan : 1. Rekonsiliasi Laporan Kasda dg bidang Perbendaharaan dan rekening Koran 2. Rekonsiliasi asset tetap dengan bidang aset 3. Rekonsiliasi Laporan OPD dengan SKPKD 4. Scan Laporan BKU OPD dan SPJ Fungsional OPD 5. Scan Register penutupan Kas dan pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran 6. Update data neraca akrual terkait kas, piutang, persediaan dan aset tetap	Tanggal 1-10 setiap bulan	1. Paling Lambat Tanggal 15 bulan berikutnya OPD harus sudah menyelesaikan entry data di system aplikasi Simda. BPKRI setiap tanggal 20 sd 25 melakukan e audit melalui aplikasi Simda
2.	Penyampaian Laporan Realisasi APBD kepada Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, BPK-RI, BPKP, Provinsi dan DJPK KPPN Mataram	diasas Tanggal 10-20 setiap bulan	1. Laporan untuk Departemen Keuangan dikirim via Komandan SIKD dan aplikasi sinergik simpatik oleh admin Simda. 2. Untuk Departemen Keuangan data yang di upload adalah data transaksi harian 3. untuk BPK di upload melalui system elektronik audit BPK oleh admin 4. untuk provinsi, BPKP dan DJPK KPPN Mataram LRA bulanan via email dan hard copy tanda tangan kepala BKD
3.	Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 bulan berikut : 1. Rekonsiliasi Laporan semester I OPD dengan SKPKD 2. OPD menyampaikan kepada PPKD 3. Disampaikan kepada Sekda 4. Disampaikan kepada Walikota 5. Disampaikan kepada DPRD 6. Disampaikan kepada departemen keuangan dan depdagri	Bulan Juli 1-10 Juli 1-10 Juli 15 Juli 20 Juli 25 Juli 25 Juli	1. paling lambat tgl 10 juli 2. Paling lambat 10 hari setelah semester I berakhir 3. Paling lambat minggu ke-2 Juli 4. Paling lambat Minggu ke-3 Juli 5. Paling lambat Akhir bulan Juli 6. Paling lambat tanggal 30 Juli (bisa di email dulu kemudian hard copy diantar)

4.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I yaitu : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. dan Laporan Operasional	Juni dan Juli	Wajib disampaikan kepada Departemen Keuangan dan BPKRI , Departemen Keuangan paling lambat 30 Juli
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1. OPD menyampaikan kepada PPKD 2. PPKD menyampaikan kepada Walikota melalui Sekda Laporan Akhir Tahun Berupa : 1. Laporan Realisasi APBD 2. Neraca daerah 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas 6. Laoran Saldo Anggaran Lebih 7. Catatan Atas Laporan Keuangan 8. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 9. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah 10. Laporan Keuangan BLUD	31 Januari 28 Februari	1. paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
6.	Penyampaian Laporan Keuangan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPKRI)	Februari s/d Maret	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
7.	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD	Mei – Juni	1. Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 2. paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
8.	Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD		Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima
9.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	paling lama 3 (tiga) hari kerja	1. paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk di evaluasi 2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
10.	Walikota menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Walikota menjadi peraturan daerah dan peraturan Walikota.		Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

11.	Walikota bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.		Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan' APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Walikota, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan Walikota dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi)
12.	Penyampaian Laporan Keuangan yang sudah diaudit kepada Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri, meliputi : 1. Laporan Realisasi APBD 2. Neraca daerah 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas 6. Laporan saldo Anggaran Lebih 7. Catatan Atas Laporan Keuangan 8. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 9. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah 10. Laporan Keuangan BLUD	Juli – Agustus (Paling Lambat 31 Agustus)	Paling Lambat 31 Agustus 1. Apabila Pemerintah daerah tidak menyampaikan maka diberikan peringatan tertulis paling lama 15 hari setelah batas waktu (15 September) 2. Apabila setelah 30 hari diterbitkan surat teguran tertulis tidak juga menyampaikan maka Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
13.	Koreksi Laporan Keuangan hasil audit, BPKRI antara BKD dengan OPD	Juni-Juli	Koreksi secara bersama sama dengan mengundang OPD Teknis
14.	Menyusun Saldo awal OPD dan SKPKD aplikasi Simda	Juni-Juli	Menyusun Saldo awal dengan melibatkan seluruh OPD sesuai hasil audit BPK RI
15.	Memantau setoran TGR dan menyusun Laporan tindak lanjut temuan TGR per bulan	Setiap bulan	Setiap bulan berkoordinasi dengan inspektorat, menjadwalkan dan melaksanakan rapat TPTGR sesuai kebutuhan.
16.	Menyusun Regulasi yaitu : 1. Kebijakan akuntansi (perubahan) 2. Sisdur akuntansi Kota Mataram 3. Kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap 4. Surat edaran teknis penyusunan Laporan Akhir Tahun	Juni-Juli	Melibatkan BPKP dan OPD teknis
17.	Pelatihan Teknis aplikasi Simda terbaru dan sosialisasi regulasi	Oktober-nopember	Pelatihan Teknis dengan melibatkan BPKP Perwakilan Propinsi NTB, dan Sosialisasi Regulasi melibatkan pihak akuntansi provinsi dan BPKP
18.	Penatausahaan piutang Daerah	Desember	Membentuk Tim Penelitian Piutang dengan melibatkan OPD teknis menyusun SK penghapusan piutang Kadaluarsa

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka Pemerintah Kota Mataram dan DPRD harus memperhatikan antara lain : “Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017 atau paling lambat tanggal 30 November 2016”

Adapun Pengukuran Kinerja berdasarkan persentase daya serap APBD, secara rinci disajikan dalam tabel 3.19 berikut ini :

Tabel 3.19
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Persentase Daya Serap APBD
(Periode Tahun Anggaran 2013-2017)

REK	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2013		TAHUN ANGGARAN 2014		TAHUN ANGGARAN 2015		TAHUN ANGGARAN 2016		TAHUN ANGGARAN 2017	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
1.	PENDAPATAN DAERAH										
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	124.957.834.100	139.877.149.932	160.495.316.854	202.589.009.699	215.599.750.389	225.076.428.194	279.679.198.140	288.454.785.249	367.503.589.415	386.863.273.924
1.1.1.	Pajak Daerah	71.550.000.000	79.374.881.763	83.080.000.000	91.749.599.728	92.655.000.000	96.844.712.693	121.485.000.000	124.416.352.804	142.097.000.000	144.866.671.600
1.1.2.	Retribusi Daerah	17.824.074.100	20.251.127.302	17.918.498.500	20.964.352.907	19.873.500.000	18.247.789.512	20.172.500.000	18.338.313.673	21.999.600.000	17.409.531.499
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.640.000.000	2.759.307.095	7.366.394.354	8.041.386.510	12.400.826.389	6.219.928.163	6.400.000.000	7.254.546.965	7.737.789.415	8.178.906.950
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	30.943.760.000	37.491.833.772	52.130.424.000	81.833.670.554	90.670.424.000	103.763.997.826	131.621.698.140	138.445.571.807	195.669.200.000	216.408.163.875
1.2.	Dana Perimbangan	580.130.769.628	580.925.364.432	681.209.075.681	677.648.349.948	768.786.761.000	757.189.767.596	948.543.457.384	981.706.491.599	970.292.218.566	941.446.451.427
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.741.156.628	45.535.751.432	64.324.774.681	60.764.048.948	63.672.014.000	52.075.020.596	79.916.325.000	110.973.075.189	116.124.581.566	103.347.515.590
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	500.043.553.000	500.043.553.000	564.661.391.000	564.661.391.000	593.930.707.000	593.930.707.000	520.799.806.384	609.016.722.000	598.318.257.000	598.318.257.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	35.346.060.000	35.346.060.000	52.222.910.000	52.222.910.000	111.184.040.000	111.184.040.000	347.827.326.000	261.716.694.410	255.849.380.000	239.780.678.837
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	159.816.841.645	145.037.324.448	213.686.428.482	202.867.204.484	227.396.709.505	206.629.065.324	129.584.409.047	126.270.963.145	86.489.050.152	95.668.209.422
1.3.1.	Hibah	5.000.000.000	-	20.000.000.000	11.000.000.000	9.000.000.000	8.778.000.000	14.811.000.000	14.811.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	43.617.605.165	37.042.319.448	64.634.697.482	72.418.554.484	76.775.311.505	66.809.067.324	68.684.380.672	68.364.134.770	69.989.050.152	79.098.009.422
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	98.967.436.480	97.256.605.000	121.519.931.000	119.413.450.000	130.989.598.000	130.989.598.000	-	-	-	-
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.231.800.000	10.700.000.000	7.531.800.000	-	10.631.800.000	-	3.434.652.375	429.652.375	-	-
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	-	38.400.000	-	35.200.000	-	52.400.000	42.654.376.000	42.666.176.000	7.500.000.000	7.570.200.000
	Jumlah Pendapatan	864.905.445.373	865.839.838.812	1.055.390.821.017	1.083.104.564.131	1.211.783.220.894	1.188.895.261.113	1.357.807.064.571	1.396.432.239.993	1.424.284.858.133	1.423.977.934.773



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram

2017

2.	BELANJA DAERAH										
2.1.	Belanja Tidak Langsung	538.538.293.459	492.775.345.289	589.494.959.692	543.564.076.969	657.253.939.435	589.492.898.964	650.165.293.740	607.986.508.674	607.907.046.576	553.923.497.789
2.1.1.	Belanja pegawai	484.028.071.029	448.797.464.283	539.560.313.692	506.848.621.241	595.737.687.201	532.875.067.509	604.179.991.659	566.359.394.373	545.118.429.699	503.924.917.657
2.1.2.	Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja hibah	25.573.197.430	24.566.079.150	24.218.986.000	17.975.572.877	33.454.425.802	31.434.939.230	26.364.821.000	24.164.891.400	33.310.186.775	26.617.650.994
2.1.5.	Belanja bantuan sosial	27.634.425.000	18.893.404.321	24.215.660.000	18.370.110.351	23.500.807.652	21.446.429.500	17.652.682.300	15.774.617.500	23.010.631.322	20.008.020.000
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	912.798.780	636.049.460	912.798.780	823.651.340	912.798.780	912.798.780
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.302.600.000	518.397.535	1.500.000.000	369.772.500	3.648.220.000	3.100.413.265	1.055.000.000	863.954.061	5.555.000.000	2.460.110.358
2.2.	Belanja Langsung	483.918.147.082	390.746.499.746	587.704.850.269	500.791.726.062	638.183.651.950	599.155.615.369	771.202.888.102	722.731.235.250	937.716.496.418	858.246.323.888
2.2.1.	Belanja Pegawai	70.756.743.858	65.262.844.825	71.447.082.600	67.103.151.958	85.294.058.779	75.157.077.198	93.755.834.600	84.052.886.026	134.334.263.310	125.564.986.754
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.159.416.420	145.133.140.522	208.411.606.059	201.856.194.367	265.047.268.211	248.611.261.850	318.213.675.306	305.241.359.109	405.950.691.362	397.930.685.053
2.2.3.	Belanja Modal	254.001.986.804	180.350.514.399	307.846.161.609	231.832.379.737	287.842.324.960	275.387.276.321	359.233.378.196	333.436.990.115	397.431.541.746	334.750.652.081
	Jumlah Belanja	1.022.456.440.541	883.521.845.035	1.177.199.809.961	1.044.355.803.031	1.295.437.591.385	1.188.648.514.333	1.421.368.181.842	1.330.717.743.924	1.545.623.542.994	1.412.169.821.677
	Surplus/Defisit	(157.550.995.168)	(17.682.006.224)	(121.808.988.945)	38.748.761.101	(83.654.370.491)	246.746.780	(63.561.117.271)	65.714.496.068	(121.338.684.861)	11.808.113.096
3.	PEMBIAYAAN DAERAH										
3.1.	Penerimaan Pembiayaan										
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	103.800.995.168	103.800.995.168	79.868.988.945	79.868.988.945	101.214.370.491	101.214.370.491	83.961.117.271	83.920.800.314	136.790.684.861	135.706.914.457
3.1.2.	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan pinjaman daerah	60.000.000.000	-	60.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-

3.1.5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	163.800.995.168	103.800.995.168	139.868.988.945	79.868.988.945	101.214.370.491	101.214.370.491	83.961.117.271	83.920.800.314	136.790.684.861	135.706.914.457
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	6.250.000.000	6.250.000.000	18.060.000.000	17.330.000.000	17.560.000.000	17.500.000.000	20.400.000.000	14.452.000.000	15.452.000.000	15.452.000.000
3.1.3.	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Netto	6.250.000.000	6.250.000.000	18.060.000.000	17.330.000.000	17.560.000.000	17.500.000.000	20.400.000.000	14.452.000.000	15.452.000.000	15.452.000.000
		157.550.995.168	97.550.995.168	121.808.988.945	62.538.988.945	83.654.370.491	83.714.370.491	63.561.117.271	69.468.800.314	121.338.684.861	120.254.914.457
3.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	79.868.988.945	-	101.287.750.045	-	83.961.117.271	-	135.183.296.382	-	132.063.027.553

Sumber : Data BKD Kota Mataram:2017

Berdasarkan data APBD tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa serapan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.427.621.821.677,- atau 92,37% dari target APBD yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.545.623.542.994 100%), sehingga jika dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, maka masih belum mencapai target 100%. Artinya masih terdapat selisih kurang sebesar 0,13 % (92,50% - 92,37%)

Berdasarkan uraian diatas, pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan dengan cascading kinerja dan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Mataram disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : 3.20
Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Bimbingan teknis implementasi SAP Akrua dengan Aplikasi SIMDA	39 OPD (100%)	41 OPD (105%)	105%
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Produk Hukum (100%)	1 Produk Hukum (100%)	100%
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Produk Hukum (100%)	1 Produk Hukum (100%)	100%
4	'Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Produk Hukum (100%)	1 Produk Hukum (100%)	100%
5	'Penyusunan Perda Pertanggungjawabann Pelaksanaan APBD	1 Produk Hukum (100%)	1 Produk Hukum (100%)	100%
6	'Penyusunan Perwal penjabaran Pertanggungjawabann Pelaksanaan APBD	1 Produk Hukum (100%)	1 Produk Hukum (100%)	100%
7	'Penyusunan Produk Produk Hukum Bidang Keuangan	3 Produk Hukum (100%)	3 Produk Hukum (100%)	100%
8	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat	2 Kegiatan (100%)	1 Kegiatan (50%)	50%
9	Penyusunan Laporan penyaluran /transfer dana bagi hasil dan lainnya	12 Kegiatan (100%)	12 Kegiatan (100%)	100%
10	'Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram	39 OPD (100%)	41 OPD (100%)	100%
11	Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi	12 Kegiatan (100%)	12 Kegiatan (100%)	100%
12	Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrua	468 Berita Acara (100%)	492 Berita Acara (105,13%)	100%
13	Penyediaan Administrasi Keuangan	12 Kegiatan (100%)	12 Kegiatan (100%)	100%

D. Pengukuran Kinerja Pengelolaan Aset Daerah

Pengukuran kinerja pengelolaan Aset Daerah didasarkan pada dua indikator pengukuran yaitu Persentase Aset Tanah/Bangunan yang Sudah Memiliki Sertifikat dan Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah yang secara rinci pengukurannya dijabarkan dalam tabel pengukuran sebagai berikut :

Tabel : 3.21
Pengukuran Kinerja berdasarkan
Persentase Sertifikasi Aset Tanah/Bangunan yang dilaksanakan

NO	Nama Tanah	Luas_M2	Tahun	Titik Bersertifikat		Ket
				Sudah	Belum	
1	Hutan Untuk Penggunaan Khusus Lainnya		2007	1	0	1
2	Kampung	2416	2004	3	0	3
3	Kebun Pembibitan	2800	2001	1	1	2
4	Kolam Air Tawar		2004	1	2	3
5	Makam Umum/Kuburan Umum	27307	1980 - 2016	0	7	7
6	Tanah Bangunan Gedung	19809	1962 - 2013	9	1	10
7	Tanah Bangunan Industri Lainnya		2005	0	1	1
8	Tanah Bangunan Kandang Hewan	300	2008	0	1	1
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	126168,2	1974 - 2017	17	43	60
10	Tanah Bangunan Pasar	129956	1987 - 2012	6	37	43
11	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	452355,7	1900 - 2016	139	34	173
12	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	100	1995	1	0	1
13	Tanah Bangunan Poliklinik	250	1981 & 2001	2	0	2
14	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	8110	1980 - 2001	9	4	13
15	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	54309	1980 - 2001	11	0	11
16	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	3506	1980 & 1993	1	1	2
17	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	4982	1975 - 2001	3	9	12
18	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	708	2007	1	0	1
19	Tanah Bangunan Rumah Penderita	900	2003	0	1	1
20	Tanah Bangunan Rumah Sakit	20437	2011	1	0	1
21	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Lainnya	7536	2008	0	1	1

22	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	34534	2006 - 2008	2	4	6
23	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	700	2001	1	0	1
24	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	251167,5	2002 - 2015	71	11	82
25	Tanah Jalan	130488	2001 - 2017	12	43	55
26	Tanah Jaringan/Saluran	1587	2005 - 2006	0	2	2
27	Tanah Kampung Lain-lain	11355	1995 - 2008	0	2	2
28	Tanah Kebun	53485	2001	0	19	18
29	Tanah Kosong Lainnya	271622	1983 - 2001	73	1	74
30	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	27201	2001 - 2017	5	13	18
31	Tanah Lapangan Olah Raga Lain-lain	34939	2000 - 2002	1	3	4
32	Tanah Lapangan Pacuan Kuda	16800	2001	1	0	1
33	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	81403	1983 - 2001	5	1	6
34	Tanah Sarana Ruas Jalan	47726	2014 - 2017	0	445	445
35	Tanah Sawah	117375,5	1983 - 2004	20	10	30
36	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	20	2010	0	1	1
37	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Baku	435	2013	0	2	2
38	Tanah Untuk Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggul	4754	2001 & 2006	0	2	2
39	Tanah Untuk Jalan Desa	901	2006 - 2010	0	4	4
40	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	64716	2009 - 2013	0	14	14
41	Tanah utk Bangunan Jaringan Lain- lain	1	2003	0	1	1
J U M L A H				397	721	1118
TARGET RENSTRA (65% X 1.118) = 730 SERTIFIKAT				730		
TARGET TAHUN 2017 (43,83% X 730) = 320 SERTIFIKAT				320		
REALISASI S,D TAHUN 2017				397		
PERSENTASE REALISASI (397/730 X 100%) = 54,38%				54,38%		

*Sumber data : BKD Kota Mataram:2017

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas menunjukkan persentase realisasi Sertifikasi Aset Tanah/Bangunan yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2017 sebesar 397 buah sertifikat atau 54,38% dari Target yang sudah ditetapkan sebesar 730 sertifikat atau 43,83%, sehingga terjadi kenaikan sebesar 10,55%. Sedangkan pengukuran kinerja berdasarkan persentase kakuratan data barang milik daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.22
Pengukuran Kinerja kegiatan berdasarkan
Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pendayagunaan Barang Milik Daerah	12 Kegiatan (100%)	12 Kegiatan (100%)	100%
2	Kerjasama Pengelolaan Aset Tanah/Bangunan	12 Kegiatan (100%)	12 Kegiatan (100%)	100%
3	Pengamanan Aset Tanah/ Bangunan	12 Kegiatan (100%)	12 Kegiatan (100%)	100%
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	12 Kegiatan (100%)	12 Kegiatan (100%)	100%
5	Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Produk Hukum (100%)	1 Produk Hukum (100%)	100%

*Sumber data : BKD Kota Mataram;2017

Sebagai bahan perbandingan, berikut disajikan Data hasil inventarisasi barang milik daerah yang tercatat dalam SIMDA-BMD dengan Data yang tercatat dalam SIMDA-KEUANGAN Per 31 Desember 2017

URAIAN	SIMDA KEUANGAN		SIMDA BMD	
	2017)*	2016	2017)*	2016
ASET TETAP				
Tanah	881.162.631.907,00	829.700.139.638,00	829.700.139.638,00	829.700.139.638,00
Peralatan dan Mesin	493.833.759.766,88	395.322.024.658,51	395.322.024.658,51	395.322.024.658,51
Gedung dan Bangunan	878.493.796.125,67	804.599.259.498,37	804.599.259.498,37	804.599.259.498,37
Jalan, Jaringan dan Instalasi	778.156.611.194,94	669.619.156.322,94	669.619.156.322,94	669.619.156.322,94
Aset Tetap Lainnya	35.672.202.278,09	34.905.050.868,39	34.905.050.868,39	34.905.050.868,39
Konstruksi dalam Pengerjaan	805.994.300,00	16.306.089.980,00	16.306.089.980,00	16.306.089.980,00
Akumulasi Penyusutan	(774.707.060.494,35)	(555.828.125.386,52)	(555.828.125.386,52)	(555.828.125.386,52)
JUMLAH ASET TETAP	2.293.417.935.078,23	2.194.623.595.579,69	2.194.623.595.579,69	2.194.623.595.579,69
ASET LAINNYA				
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	73.350.999,60	73.350.999,60	73.350.999,60	73.350.999,60
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00
Aset Tidak Berwujud	1.987.997.700,00	1.579.194.800,00	1.579.194.800,00	1.579.194.800,00
Aset Lain-lain	34.145.467.689,50	34.696.693.026,80	34.696.693.026,80	34.696.693.026,80
amortisasi aset tidak berwujud	(372.224.693,00)	(212.108.937,00)	(212.108.937,00)	(212.108.937,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	266.963.321.696,10	267.265.859.889,40	267.265.859.889,40	267.265.859.889,40
TOTAL INVENTARISASI ASET	2.560.381.256.774,33	2.461.889.455.469,09	2.461.889.455.469,09	2.461.889.455.469,09

Sumber Data BKD Kota Mataram, 2017

2017)* : Data Sementara/belum Audit BPK-RI

3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) karena Keberhasilan pelaksanaan program dapat dilihat dari tingkat capaian masing-masing Misi dalam Renstra yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada penetapan sasaran-sasaran strategis dengan mengimplementasikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh karena itu Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, melalui Penetapan Indikator Kinerja Utama, menyajikan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama itu Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2017 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		PERSENTASE (%)
				2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	90	-	67,87	75,41%
2	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target Penerimaan Pajak Daerah	5% dari Tahun Sebelumnya	28,46%	16,44%	11,44%
		Persentase Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Hasil Koordinasi	100%	103,12 %	105,26 %	105,26%
3	Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Dlm Proses Pemeriksaan	-
		Persentase Daya Serap APBD	94,5%	93,30%	92,37%	97,75%
		Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%
4	Tercapainya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sesuai prosedur	Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah memiliki Sertifikat	65% (730)	39,36% (287)	54,63% (397)	54,63%
		Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%

*Sumber data : BKD Kota Mataram:2017 (diolah)

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian IKU yang terkait Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram telah melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan pada periode Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tahun 2016–2021. Dari target tahun 2017 sebesar 65 (bobot), realisasinya sebesar 67,87 (bobot) sehingga terjadi peningkatan sebesar 2,87 (bobot) dari yang telah ditetapkan.
2. Pencapaian IKU yang terkait Persentase Peningkatan Target Penerimaan Pajak Daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu naik sebesar 11,44% dari 5 (lima) persen yang ditargetkan setiap tahun.
3. Pencapaian IKU yang terkait Persentase Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Hasil Koordinasi telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu naik sebesar 5,26% dari target setelah perubahan sebesar Rp. 367.503.589.415,- dengan realisasi sebesar Rp. 386.835.117.245,-
4. Pencapaian IKU yang terkait Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum dapat diukur karena belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK perwakilan NTB.
5. Pencapaian IKU yang terkait Persentase Daya Serap APBD, Tahun 2016 sebesar 1.345.169.743.924,- atau 93,30 %, dari target sebesar Rp. 1.441.768.181.842,- yang telah ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2017 daya serap APBD sebesar Rp. 1.427.621.821.677,- atau 92,37% dari target sebesar Rp. 1.561.075.542.994,58.
6. Pencapaian IKU yang terkait Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah menunjukkan angka capaian sebesar 100% hal ini disebabkan karena ketentuan yang sudah diatur dalam Permendagri 13 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama yang terkait dengan Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah memiliki Sertifikat, menunjukkan angka capaian sebesar 397 sertifikat atau 54,38% dari total yang ditargetkan sebesar 730 sertifikat, hal tersebut disebabkan karena :
 - Alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan diutamakan pada kegiatan pemecahan sertifikat, pengadaan asset tanah untuk tanah pekatu, pelebaran jalan, pembebasan lahan untuk tanah pasar dan pembebasan tanah lapangan serta untuk pembayaran hutang tanah.

- Kerjasama dengan BPN Kota Mataram terkait pembuatan sertifikat hak milik pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan karena terkendala BPN Kota Mataram masih dalam proses pembuatan sertifikat prona masyarakat.
 - Proses pengukuran dalam pengadaan aset tanah dilakukan oleh BPN Kota Mataram, sehingga harus menunggu jadwal pengukuran yang ditentukan oleh BPN Kota Mataram
 - Proses Administrasi kepengurusan Sertifikat hak milik yang masih melekat sebagai hak anggunan dari Bank sehingga menghambat proses pemecahan sertifikat.
8. Pencapaian Indikator Kinerja Utama yang terkait Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah menunjukkan hasil yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja sebesar 100%.

3.4. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Keuangan Daerah Kota Mataram telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016–2021. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Mataram pada Rencana Strategis Tahun 2016–2021 adalah sebanyak 4 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017. Adapun pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Tabel : 3.24
Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram

No	Predikat	Jumlah sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Berhasil	4	8
2	Berhasil	–	–
3	Cukup Berhasil	–	–
4	Kurang Berhasil	–	–

Pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tercermin dalam matrik sebagai berikut :

Tabel : 3.25

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram

NO	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Capaian Rata-rata (%)	<55	55 s/d< 70	70 s/d < 85	85 s/d 100
MISI WALIKOTA MATARAM YANG KE-IV: MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN							
1	Tercapainya Tertib Administrasi pengelolaan Aset Daerah Sesuai Prosedur	2	77,19%	-	-	Berhasil	-
Capaian Rata-rata Misi IV (2 IKU)			77,19%				
MISI WALIKOTA MATARAM YANG KE-V: MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPERMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1	99,83%	-	-	-	Sangat Berhasil
2	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	2	98.74%				Sangat Berhasil
3	Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	3	97,15%				Sangat Berhasil
Capaian Rata-rata Misi V (6 IKU)			98,57%		Sangat Berhasil		
Rata-Rata Seluruh Capaian Misi (8IKU)			87,88%		Sangat Berhasil		

Adapun uraian dari Pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, secara rinci dijabarkan dalam tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.26
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Terkait
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Indikator	Uraian	Target	Realisasi	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	Survey Kepuasan Masyarakat	65 Skor (100%)	67,87 Skor (104,,42%)	
			Pelayanan Permohonan Wajib Pajak Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%	94,89%	
			Pengembangan/ pemeliharaan sistem Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100%	100%	
			Penyediaan Fasilitas Online Pajak Daerah	100%	100%	
Total Capaian (IKU)					399,31%	
Rata-Rata Capaian (IKU)					99,83%	

Dari Tabel Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk tahun 2017 dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,83%, dengan kategori sangat berhasil.

Tabel : 3.27
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Terkait Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Perkate Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah						
No	Sasaran	Indikator	Uraian	Target	Realisasi	Ket
1	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pendataan dan Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah	100%	115,38%	
			Persentase peningkatan Penetapan Pajak Daerah	100%	92%	
			Persentase peningkatan Penagihan Pajak Daerah	100%	95,17%	
			Persentase Implementasi Peraturan2 tentang Pajak Daerah yang tersosialisasikan	100%	87,57%	
			Persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah	100%	97,22%	
Capaian (IKU-1)					97,47%	

2		Meningkatnya Koordinasi PAD dengan OPD Pengelola PAD	Persentase Koordinasi Sumber-sumber PAD yang dikelola	100%	100%	
			Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD	100%	100%	
			Persentase Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah	100%	100%	
Capaian (IKU-2)					100%	
Rata-Rata Capaian (IKU1,2)					98,74%	

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 98,74%, dengan kategori Sangat Berhasil.

Tabel : 3.28
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Terkait Tercapainya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Indikator	Uraian	Target	Realisasi	Ket
1	Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yg telah menerapkan SAP	100%	100%	
			Persentase Implementasi Paket Regulasi tentang Penyusunan APBD dan APBDP	100%	100%	
			Persentase penyediaan Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100%	100%	
			Persentase Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	
			Persentase penyediaan Laporan penyaluran/ transfer dana bagi hasil dan lainnya	100%	100%	
Capaian (IKU-1)					100%	
2		Pesentase Daya Serap APBD	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan	100%	92,37%	
			Persentase Nilai Kerugian Daerah menurun sesuai standar	100%	90,51%	
Capaian (IKU-2)					91,44%	
3		Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Persentase menurunnya kesalahan administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	
Capaian (IKU-3)					100%	
Rata-Rata Capaian (IKU1,2,-3)					97,15%	

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis terkait Tercapainya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 96,07%, dengan kategori Sangat Berhasil.

Tabel : 3.29

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Terkait Tercapainya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sesuai prosedur

Perkembangan Tercapainya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sesuai prosedur						
No	Sasaran	Indikator	Uraian	Target	Realisasi	Ket
1	Tercapainya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sesuai prosedur	Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah memiliki Sertifikat	Persentase sertifikasi Aset Tanah/Bagunan yang dilaksanakan	100%	54,38%	
Capaian (IKU-1)					54,38%	
2		Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sdh diinventarisasi/Up date BMD	100%	100%	
			Tersedianya Paket Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	
Capaian (IKU-2)					100%	
Rata-Rata Capaian (IKU1,2)					77,19%	

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis terkait Tercapainya Tercapainya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sesuai prosedur dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 77,19%, dengan kategori Berhasil.

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Tujuan desentralisasi salah satunya adalah peningkatan pelayanan

publik dengan meletakkan kewenangan pengelolaan sebagian urusan pemerintahan dan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Kewenangan pengelolaan keuangan daerah berimplikasi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik, sehingga keberhasilan keuangan daerah dengan demikian perlu diukur dengan menggunakan beberapa indikator tertentu. Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam kapasitas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan keberhasilan yang dicapai, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keuangan daerah dalam mengetahui efektifitas dan efisiensi serta Pertumbuhan Pajak Daerah, digunakan parameter sebagai berikut :

1. Rasio Efektifitas Pendapatan Pajak Daerah

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Badan Keuangan Daerah dalam merealisasikan Pajak Daerah yang dikelola yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil yang ada. Kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Adapun Rasio Efektifitas Pendapatan Pajak Daerah dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 3.30
Rasio Efektifitas Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efektifitas
2013	71.550.000.000	79.374.881.763	110,94
2014	83.080.000.000	91.749.599.728	110,44
2015	92.655.000.000	96.844.712.693	104,52
2016	121.485.000.000	124.416.352.804	102,41
2017	142.097.000.000	144.866.671.600	101,95

Pada Tabel 3.30 di atas dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pendapatan Pajak Daerah Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 – 2017) mengalami penurunan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tahun 2012–2013 sebesar 4,29%

(115,22% – 110,94%), Tahun 2013–2014 sebesar 0,50% (110,94% – 110,44%), Tahun 2014–2015 sebesar 5,91% (110,44% – 104,52%), Tahun 2015–2016 sebesar 2,11% (104,52% – 102,41%) dan Tahun 2016–2017 sebesar 0,46% (102,41% – 101,95%) Jadi Selama lima tahun terakhir rasio efektifitas menggambarkan kondisi yang semakin menurun, namun peningkatan target yang sangat signifikan dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan pendapatan Pajak Daerah yang semakin membaik..

2. Rasio Efisiensi Pendapatan Pajak Daerah

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai. Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Badan Keuangan Daerah dikatakan Efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi, kemampuan Badan Keuangan Daerah akan semakin baik. Adapun Rasio Efisiensi Pendapatan Pajak Daerah dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi Pendapatan Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Sumber Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 3.31
Rasio Efisiensi Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Biaya Pemungutan Sumber Pajak Daerah	Rasio Efisiensi
2013	79.374.881.763	5.744.552.000	7,24
2014	91.749.599.728	5.562.445.862	6,06
2015	96.844.712.693	6.641.317.000	6,86
2016	124.416.352.804	6.056.383.249	4,87
2017	144.866.671.600	9.440.767.275	6,52

Pada Tabel 3.31 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi Pendapatan Pajak Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013–2017) mengalami penurunan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada Tahun 2012–2013 sebesar 3,78% (11,01% – 7,24%), Tahun 2013–2014 sebesar 1,17% (7,24% – 6,06%) dan Tahun 2015–2016 sebesar 1,99% (6,86% – 4,87%). Sedangkan mengalami kenaikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Tahun 2014–2015 sebesar 0,80% (6,06% – 6,86%), dan Tahun 2016–2017

sebesar 1,65% (4,87% – 6,52). Jadi dapat dikatakan selama lima tahun terakhir tingkat efisiensi dalam pemungutan pajak daerah menggambarkan kondisi yang Sangat baik.

Sedangkan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam kapasitas sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah, indikator yang digunakan untuk mengukur keuangan daerah dalam mengetahui efektifitas dan efisiensi serta Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, digunakan parameter sebagai berikut :

1. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 3.32
Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas
2013	124.957.834.100	139.877.149.932	111,94
2014	160.495.316.854	202.589.009.699	126,23
2015	215.599.750.389	225.076.428.194	104,40
2016	279.679.198.140	288.454.785.249	103,14
2017	367.503.589.415	386.863.273.924	105,27

• Sumber : Data BKD Kota Mataram Tahun 2017

Pada Tabel 3.32 di atas dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 – 2017) mengalami kenaikan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2013–2014 sebesar 14,29% (111,94% – 126,23%) dan Tahun 2016–2017 sebesar 2,13% (103,14% – 105,27%). Sedangkan mengalami penurunan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Tahun (2012 –2013) sebesar 9,67% (121,61% –111,94%) , Tahun (2014–2015) sebesar 21,83% (126,23%– – 104,40%) dan Tahun 2015–2016 sebesar 1,26% (104,40% – 103,14%). Jadi Selama lima tahun terakhir rasio efektifitas menggambarkan kondisi yang semakin menurun, namun peningkatan target yang sangat signifikan dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan pendapatan yang semakin membaik.

2. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Sumber PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 3.33

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Biaya Pemungutan Sumber PAD	Rasio Efisiensi
2013	139.877.149.932	12.310.722.706	8,80
2014	202.589.009.699	13.748.060.656	6,79
2015	225.076.428.194	14.119.472.975	6,27
2016	288.454.785.249	14.845.738.325	5,15
2017	386.863.273.924	18.614.863.275	4,81

• Sumber : Data BKD Kota Mataram Tahun 2017

Pada Tabel 3.33 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 – 2017) mengalami penurunan setiap tahunnya sebanyak 3 (Tiga) kali, yaitu pada Tahun 2012–2013 sebesar 2,88% (11,68% – 8,80%), Tahun 2013–2014 sebesar 2,01% (8,80% – 6,79%), Tahun 2014–2015 sebesar 0,51% (6,79% – 6,27%), Tahun (2015–2016) sebesar 1,13% (6,27% – 5,15%) dan Tahun 2016–2017 sebesar 0,33% (5,15% – 4,81%). Jadi dapat dikatakan selama lima tahun terakhir tingkat efisiensi menggambarkan kondisi yang semakin baik.

3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui Pertumbuhan PAD maka dapat dilakukan Evaluasi terhadap potensi–potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Adapun Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD } t1 - \text{PAD } t0}{\text{PAD } t0} \times 100 \%$$

Tabel 3.34
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	PAD t0	PAD t1	Rasio Pertumbuhan
2012-2013	95.877.364.968	139.877.149.932	45,89%
2013-2014	139.877.149.932	202.589.009.699	44,83%
2014-2015	202.589.009.699	225.076.428.194	11,10%
2015-2016	225.076.428.194	288.454.785.249	28,16%
2016-2017	288.454.785.249	386.863.273.924	34,12%

• Sumber : Data BKD Kota Mataram Tahun 2017

Pada Tabel 3.34 di atas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2012 – 2017) mengalami penurunan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dari tahun 2012-2013 sebesar (45,89%), turun 0,06% pada Tahun 2013-2014 sebesar (44,83%), tahun 2013-2014 sebesar (44,83%), turun 33,73% pada Tahun 2014-2015 sebesar (11,10%). Sedangkan kenaikan terjadi dari Tahun (2011-2012) sebesar (16,50%), naik 29,39% pada Tahun 2012-2013 sebesar (45,83%), Tahun 2014-2015 sebesar (11,10%), naik 17,06%. Pada tahun 2015-2016 sebesar (28,16%) dan Tahun 2015-2016 sebesar (28,16), naik 5,96% pada Tahun 2016-2017 sebesar (34,12%)J adi dapat dikatakan selama lima tahun terakhir tingkat Pertumbuhan PAD menggambarkan kondisi yang cukup baik.

4. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur derajat kepekaan PAD terhadap adanya perubahan perekonomian. Adapun Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram untuk Tahun 2017 dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{PAD Elasticity} &= \frac{\text{Pertumbuhan Penerimaan PAD}}{\text{Pertumbuhan PDRB}} \times 100 \% \\
 &= \frac{34,12}{8,11} \times 100 \% \\
 &= 4,21\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil analisa ratio di atas dengan mengacu pada potensi maupun capaian PAD, maka pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat ratio efektifitas pengelolaan PAD sebesar 105,27% yang diimbangi dengan tingkat ratio efisiensi PAD sebesar 4,81%, dan ratio pertumbuhan PAD sebesar 4,21% menggambarkan Kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi lebih efektif serta tingkat kemandirian dalam pengumpulan sumber-sumber penerimaan mengalami peningkatan. Tingkat kemandirian dalam pengumpulan sumber-sumber penerimaan yang mengalami peningkatan dengan kenaikan persentase di atas 10% dapat dilihat pada tabel 3.32 Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap APBD di bawah ini.

Tabel 3.35
Persentase Realisasi Penerimaan PAD terhadap APBD

Tahun	PAD (Rp)	APBD (Rp)	PERSENTASE (%)
2013	139.877.149.932	969.640.833.980	14,43%
2014	202.589.009.699	1.162.973.553.076	17,42%
2015	225.076.428.194	1.290.109.631.604	17,45%
2016	288.454.785.249	1.480.353.040.307	19,49%
2017	386.863.273.924	1.559.684.849.231	24,80%

Sumber Data : Laporan Realisasi APBD, 2013-2017;

Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tahun 2017 sebesar Rp. 70.505.110.780 atau 62,41% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 112.979.599.909. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.36
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	
					KEUANG GAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
			112.979.599.909	70.505.110.780	62,41	83,93
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		7.722.091.000	5.411.978.823	70,08	100
		01 Penyediaan jasa surat menyurat	10.275.000	2.937.000	28,58	100
		02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	287.600.000	193.358.190	67,23	100
		03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	63.050.000	10.595.000	16,80	100
		06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	171.336.000	69.079.540	40,32	100
		8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	201.250.000	167.226.400	83,09	100
		10 Penyediaan alat tulis kantor	603.510.000	352.866.000	58,47	100
		11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	229.180.000	156.395.075	68,24	100
		12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000.000	19.740.500	78,96	100
		13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.232.215.000	1.544.564.575	69,19	100
		14 Penyediaan peralatan rumah tangga	27.500.000	12.028.000	43,74	100
		15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	142.700.000	18.900.000	13,24	100
		17 Penyediaan makanan dan minuman	431.125.000	50.925.000	11,81	100
		18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.100.000.000	852.326.043	77,48	100
		19 Penyusunan Dokumen Perencanaan	56.800.000	50.187.500	88,36	100
		20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian	597.800.000	454.200.000	75,98	100
		26 Penyediaan Administrasi Keuangan	1.542.750.000	1.456.650.000	94,42	100
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		89.885.721.284	53.867.628.807	59,93	59,93
		03 Pembangunan gedung kantor	-	-	0,00	0,00
		5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional	5.535.340.000	5.489.573.700	99,17	100
		10 Pengadaan mebeleur	185.908.655	184.250.000	99,11	100
		11 Pengadaan Tanah	83.529.272.679	47.985.736.109	57,45	57,45

		12	Pengadaan Gedung Kantor	-	-	0,00	0
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	155.500.000	27.715.000	17,82	100
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	398.550.000	101.703.998	25,52	100
		42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	81.149.950	78.650.000	96,92	100
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			129.650.000	111.922.000	86,33	100
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	41.050.000	40.800.000	99,39	100
		11	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Kota Mataram	7.000.000	3.972.000	56,74	100
		12	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram	-	-	0,00	0
		13	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram	66.450.000	57.000.000	85,78	100
		14	Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram	15.150.000	10.150.000	67,00	100
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			15.242.137.625	11.113.581.150	72,91	72,91
		06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	638.975.000	497.250.000	77,82	100
		07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	165.240.000	103.800.000	62,82	100
		08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	538.100.000	393.300.000	73,09	100
		09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	109.350.000	70.905.000	64,84	64,84
		10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	194.560.000	143.445.000	73,73	100
		11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	55.130.000	43.830.000	79,50	79,50
		12	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah	731.587.500	620.100.000	84,76	80,26
		13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	251.550.000	213.600.000	84,91	100
		14	Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah	47.885.000	1.576.600	3,29	3,29
		18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	268.680.000	45.960.000	17,11	100
		19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	266.000.000	230.000.000	86,47	30,77

	20	Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD	99.850.000	27.250.000	27,29	34,70
	22	Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)	861.050.000	511.843.400	59,44	100
	24	Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100.200.000	25.500.000	25,45	25,45
	26	Peningkatan Management Penagihan Pajak/Retribusi Daerah	210.812.500	204.300.000	96,91	100
	28	Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	3.601.537.725	3.317.645.350	92,12	100
	31	Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan	81.225.000	20.300.000	24,99	24,99
	34	Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi	160.050.000	146.550.000	91,57	100
	38	Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah	486.875.000	243.507.750	50,01	50,01
	43	Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah	576.600.000	556.000.000	96,43	100
	45	Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah	194.320.000	99.870.000	51,39	51,39
	46	Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah	318.340.000	305.600.000	96,00	100
	49	Penghapusan Barang Milik Daerah	187.850.000	96.250.000	51,24	51,24
	54	Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	911.400.000	654.075.000	71,77	71,77
	55	Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah	535.350.000	282.150.000	52,70	52,70
	56	Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	294.000.000	214.350.000	72,91	72,91
	57	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah	162.720.000	117.560.750	72,25	72,25
	58	Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrua	495.450.000	317.378.800	64,06	64,06
	59	Pemindahtanganan BMD	238.800.000	231.800.000	97,07	100
	60	Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah	90.500.000	90.500.000	100,00	100
	61	Bimbingan Teknis Implementasi SAP Akrua dengan Aplikasi Simda	53.249.900	8.664.000	16,27	16,27
	63	Peningkatan Penghapusan Piutang Daerah	66.500.000	60.250.000	90,60	100
	64	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat	9.000.000	600.000	6,67	6,67

		65 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	634.900.000	606.500.000	95,53	100
		66 Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah	702.500.000	611.369.500	87,03	100
		73 Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	902.000.000	-	0,00	0,00

Penyerapan anggaran sebesar 62,41% merupakan hasil efisiensi belanja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram yang dilakukan dalam tahun anggaran 2017. Beberapa hal upaya efisiensi anggaran yang dilakukan antara lain:

1. Belanja rutin pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Dalam proses pengadaan barang, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram mendorong dilakukan survei harga barang dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta mencari perbandingan harga barang dari 3 rekanan untuk menjaga agar proses pengadaan barang tetap memperoleh harga termurah.
3. Penurunan volume belanja yang disebabkan oleh faktor teknis saat pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat dimanfaatkan sebagai :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2017, secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Empat sasaran strategis dengan delapan Indikator Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017, telah dapat direalisasikan 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja dengan katagori sangat berhasil, Kondisi tersebut disebabkan karena upaya-upaya maksimal yang telah dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, disimpulkan sebagai berikut :

- Empat (4) sasaran dengan delapan (8) Indikator Kinerja telah mencapai (87,88%), dengan Kategori Sangat Berhasil

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai pengelola keuangan daerah, berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis terhadap tercapainya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sesuai prosedur menunjukkan persentase capaian sebesar 77,19%. Kondisi tersebut disebabkan karena persentase sertifikasi asset tanah/bangunan yang telah dilaksanakan mencapai 54,38% artinya telah melampaui target kinerja yang diharapkan pada tahun 2017 sebesar 43,83%. Namun demikian upaya perbaikan kinerja terus ditingkatkan, banyaknya permasalahan terkait pensertifikatan asset tanah pemerintah daerah menjadi catatan untuk

dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pada tahun-tahun mendatang. Adapun permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 antara lain disebabkan :

1. Alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan diutamakan pada kegiatan pemecahan sertifikat, pengadaan aset tanah untuk tanah pecatu, pelebaran jalan, pembebasan lahan untuk tanah pasar dan pembebasan tanah lapangan serta untuk pembayaran hutang tanah.
2. Kerjasama dengan BPN Kota Mataram terkait pembuatan sertifikat hak milik pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan karena terkendala BPN Kota Mataram masih dalam proses pembuatan sertifikat prona masyarakat.
3. Proses pengukuran dalam pengadaan aset tanah dilakukan oleh BPN Kota Mataram, sehingga harus menunggu jadwal pengukuran yang ditentukan oleh BPN Kota Mataram
4. Proses Administrasi kepengurusan Sertifikat hak milik yang masih melekat sebagai hak anggunan dari Bank sehingga menghambat proses pemecahan sertifikat.

Sedangkan penatausahaan aset daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram pada akhir tahun 2016 sudah memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan aset tanah/ bangunan, dengan menciptakan sistem administrasi yang terstruktur, rapi dan akuntabel. Badan Keuangan Daerah Kota Mataram telah melaksanakan inventarisasi melalui pencatatan dan pengumpulan data agar data yang dikelola relevan dengan kondisi dan situasi data saat ini. Hasil inventarisasi tersebut selanjutnya di up date ke dalam pengembangan system informasi manajemen barang milik daerah (Simda BMD) untuk dilakukan mapping asset daerah dan memastikan data barang milik daerah sudah sesuai dengan neraca masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Pada Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja pada pengukuran kinerja sasaran strategis di atas menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat baik yaitu dengan tingkat capaian sebesar 98,26%. Berdasarkan Hasil evaluasi sasaran strategis terhadap tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram telah memenuhi kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas sistem pengendalian intern, namun demikian perlu upaya perbaikan yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pada laporan keuangan melalui antara lain Peningkatan komitmen pimpinan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, penyempurnaan

peraturan terkait kebijakan akuntansi dan mengembangkan aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi, serta peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi.

Sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan hasil pengukuran terhadap tingkat Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan persentase sebesar 105,27% dengan Tingkat Efisiensi Pembiayaan sebesar 4,81%. Sedangkan Ratio Pertumbuhan PAD menunjukkan persentase sebesar 34,12% dengan Tingkat Elasticity PAD sebesar 4,21%. Kondisi tersebut menggambarkan tingkat kemandirian dalam pengumpulan dan peningkatan sumber-sumber PAD semakin baik. Hasil Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tak lepas dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan yang telah dilakukan selama periode tahun berjalan. Beberapa strategi intensifikasi yang telah dilakukan terkait dengan upaya peningkatan PAD selama tahun 2017 antara lain :

1. Melakukan perbaikan terhadap management data base potensi-potensi pajak daerah yang dikelola badan keuangan daerah kota mataram.
2. Peningkatan disiplin kerja dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah dan pelatihan pelayanan pajak daerah.
3. Melakukan sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan pajak daerah sesuai amanat uu nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Melakukan kegiatan pendataan dalam rangka memperoleh data yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan melakukan pendataan pasif untuk wajib pajak yang datang sendiri dan pendataan aktif dengan melakukan pendataan langsung kepada wajib pajak PBB-P2
5. Melakukan monitoring dan pengawasan pajak daerah serta melakukan penelitian dan pemeriksaan pajak daerah dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan target PAD.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan serta penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pemungutan pajak daerah dan peningkatan kinerja pelayanan pajak daerah
7. Penerapan system pengelolaan pajak daerah dengan optimalisasi informasi dan teknologi (IT).

Sedangkan kiat-kiat ekstensifikasi yang dilakukan melalui perluasan basis pajak dengan tetap berpedoman pada amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2016–2021, dan khususnya yang juga dituangkan dalam Penetapan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2017 dapat dipenuhi dengan baik. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi 100% target yang telah ditetapkan, harus menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja agar lebih baik pada tahun–tahun mendatang.

Mataram, Januari 2017

Kepala Badan Keuangan Daerah

Kota Mataram,



H. MOH. SYAKIRIN, HUKMI, SE, MM
NIP. 19640507 199203 1 016

LAMPIRAN

- Tabel Keselarasan Kinerja Out Put Penganggaran
- Laporan Neraca Badan Keuangan Daerah Kota Mataram selaku SKPD
- Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
- Review Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
- Review Cascading Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram

Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTSI HASIL (Ya/Tidak)	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PRORAM		PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Ya/Tidak)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Ya/Tidak)	ANGGARAN (Rp)		KETERANGAN
						URAIAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM					TERKAIT	TIDAK TERKAIT	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ya	1	Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelayanan Permohonan Wajib Pajak Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti sesuai SOP	YA	Terlaksananya Pelayanan Permohonan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan Permohonan Wajib Pajak Daerah yang dilaksanakan	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah	162.720.000,00	-	
								YA	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah	Jumlah Penanganan Pengaduan Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah yang dilaksanakan	Penanganan Pengaduan Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah	-		
								YA	Terlaksananya Pelayanan BUD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)	861.050.000,00		
								YA	Terlaksananya Pelayanan Anggaran Satuan Kerja	Jumlah Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang dilaksanakan	Pembahasan RKA SKPD dan DPA SKPD	99.850.000,00		
								YA	Terlaksananya Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang dilaksanakan	Bimbingan Teknis Implementasi SAP Akrua dengan Aplikasi Simda	53.249.900,00		
								YA	Terlaksananya Pelayanan Rekonsiliasi BMD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD yang diterbitkan	Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	294.000.000,00		

							Persentase Pengembangan/ pemeliharaan sistem Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	YA	Terlaksananya kegiatan Pengembangan / Pemeliharaan sistem Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Pengembangan/ Pemeliharaan Sistem Pajak Daerah yang dilaksanakan	Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah	194.320.000,00		
								YA	Terlaksananya kegiatan pengembangan/ pemeliharaan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)	Jumlah kegiatan Pengembangan/ Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	251.550.000,00		
								YA	Terlaksananya kegiatan pengembangan/ pemeliharaan sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIMDA BMD)	Jumlah kegiatan Pengembangan/ Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIMDA BMD) yang dilaksanakan	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah	731.587.500,00		
							Persentase Penyediaan Fasilitas Online Pajak Daerah	YA	Tersedianya Fasilitas On line Pajak Daerah	Jumlah Fasilitas On line Jenis Pajak daerah yang disediakan	Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah	-		
							Persentase Pendataan dan Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah	YA	Terlaksananya pendataan dan Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah	Jumlah pemutakhiran data base pajak daerah yang dilaksanakan	Pendataan Obyek Pajak Daerah	100.200.000,00		
2	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	YA	2	Persentase Peningkatan Target Penerimaan Pajak Daerah						Jumlah Wajib Pajak Baru yang terdata	Pendataan Obyek Pajak Daerah	-		
							Persentase peningkatan Penetapan Pajak Daerah	YA	Terlaksananya Penerbitan SKPD/SKPKDB/SPPT PBB untuk pajak daerah dengan sistem Official Assesment	Persentase Penerbitan SKPD/SKPKDB/SPPT PBB untuk pajak daerah dengan sistem Official Assesment	Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	576.600.000,00		
								YA	Tercapainya Realisasi pajak daerah dengan sistem Official Assesment	Persentase Realisasi pajak daerah dengan sistem Official Assesment	Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	-		
								YA	Tercapainya Realisasi pajak daerah dengan sistem Self Assesment dalam 1 Tahun	Persentase Realisasi pajak daerah dengan sistem Self Assesment	Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah	-		

							Persentase peningkatan Penagihan Pajak Daerah	YA	Terlaksananya Penanganan WP yang belum membayar Pajak Daerah	Persentase Penangan WP yang belum membayar Pajak Daerah	Peningkatan Management Penagihan Pajak Daerah	210.812.500,00		
								YA	Terlaksananya Penanganan WP yang belum membayar Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Tunggakan Pajak Daerah	Peningkatan Management Penagihan Pajak Daerah	-		
							Persentase Implementasi Peraturan2 tentang Pajak Daerah yang tersosialisasikan	YA	Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah Jenis pajak daerah yang mendapat sosialisasi	Sosialisasi Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah	486.875.000,00		
										Persentase WP yang memahami Peraturan tentang Pajak Daerah	Sosialisasi Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah	-		
							Persentase peningkatan pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah	YA	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan	Pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah	634.900.000,00		
			3	Persentase Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Hasil Koordinasi			Persentase Koordinasi Sumber-sumber PAD yang dikelola	YA	Terlaksananya Koordinasi PAD dengan OPD Pengelola PAD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD Pengelola PAD yang dilaksanakan	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	266.000.000,00		
							Persentase Evaluasi dan Pelaporan PAD	YA	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan PAD	Jumlah Jenis Pajak Daerah yang dievaluasi	Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah	318.340.000,00		
							Persentase Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah	YA	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah penyempurnaan 10 jenis Landasan Hukum Pemungutan Pajak Daerah yang dilaksanakan	Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah	702.500.000,00		
3	Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	YA	4	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Persentase SKPD yg telah menerapkan SAP	YA	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang disusun tepat waktu	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	638.975.000,00		
							Persentase Implementasi Paket Regulasi tentang Penyusunan APBD dan APBDP	YA	Tersedianya Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang disusun tepat waktu	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	538.100.000,00		

									Terlaksananya Penyusunan Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	55.130.000,00		
							Persentase penyediaan Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	YA	Tersedianya Perda Pertanggungjawabann Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawabann Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	194.560.000,00		
							Persentase Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	YA	Tersedianya Perwal Penjabaran Pertanggungjawabann Pelaksanaan APBD	Jumlah Perwal penjabaran Pertanggungjawabann Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-		
								YA	Tersedianya Produk Hukum Bidang Keuangan	Jumlah Produk Produk Hukum Bidang Keuangan yang disusun	Penyusunan Produk Produk Hukum Bidang Keuangan	81.225.000,00		
								YA	Terlaksananya BinteK Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat	Jumlah Pelaksanaan BinteK Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat	9.000.000,00		
							Persentase penyediaan Laporan penyaluran/ transfer dana bagi hasil dan lainnya	YA	Terlaksananya pelaporan dan pembukuan pendapatan daerah	Jumlah Laporan penyaluran /transfer dana bagi hasil dan lainnya yang disusun	Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah	-		
			5	Pesentase Daya Serap APBD			Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan	YA	Tersedianya Laporan Keuangan yang disampaikan OPD dengan Tepat Waktu	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram	66.450.000,00		

						Persentase Nilai Kerugian Daerah menurun sesuai standar	YA	Tersedianya Dokumen Pemantauan Tindaklanjuti Kerugian Daerah	Jumlah dokumen pemantauan tindak lanjut kerugian daerah yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi	160.050.000,00		
			6	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah		Persentase menurunnya kesalahan administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	YA	Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Jumlah berita acara rekonsiliasi yang diterbitkan	Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrua	495.450.000,00		
							YA	Terlaksananya Tata Kelola Keuangan Yang Efektif dan Efisien	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pengelolaan program/Kegiatan tepat Waktu sesuai anggaran Kas	Penyediaan Administrasi Keuangan	1.542.750.000,00		
4	Tercapainya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sesuai prosedur	YA	7	Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah memiliki Sertifikat		Persentase sertifikasi Aset Tanah/Bangunan yang dilaksanakan	YA	Terlaksananya Penelusuran Aset Tanah/Bangunan Milik Daerah	Persentase Aset Tanah/Bangunan yang ditelusuri	Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah	535.350.000,00		
							YA	Terlaksananya Kerjasama Pengelolaan Aset Tanah/Bangunan	Persentase Aset Tanah/Bangunan yang dikerjasamakan	Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah	-		
							YA	Terlaksananya Pengamanan Aset Tanah/Bangunan	Persentase Pengamanan Tanah/Bangunan	Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah	-		
			8	Persentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah		Persentase BMD yang sdh diinventarisasi/Up date BMD	YA	Terlaksananya Inventarisasi BMD	Jumlah pelaksanaan kegiatan Inventarisasi BMD	Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	911.400.000,00		
						Persentase Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	YA	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah	90.500.000,00		
JUMLAH											11.263.494.900,00	-	

*KETERANGAN :

1. Berdasarkan data keselarasan kinerja out put penganggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tahun 2017 disebutkan bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan prioritas adalah sebesar Rp. 11.738.619.900,-, dari total anggaran belanja langsung yang ditetapkan dalam DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah Kota Mataram pada Tahun 2017 sebesar Rp. 112.979.599.909,36. Sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 101.716.105.009,- yang merupakan program kegiatan penunjang dan sisa lebih anggaran yang tidak dipergunakan pada tahun berkenaan (efisiensi), sehingga dapat dikatakan **“TIDAK SELARAS”**

2. Ketidakselarasan tersebut disebabkan karena pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah yang merupakan kegiatan prioritas berada pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, bukan pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Mataram yang merupakan Bidang Teknis tempat pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan. Besaran Anggaran Pengadaan tanah sesuai dengan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah Kota Mataram adalah sebesar Rp. 83.529.272.679,-. Sehingga kedepan sesuai dengan Rencana Kerja TA. 2018 yang telah disusun, Pengadaan Tanah sudah dialihkan kegiatannya ke Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

3. Adapun Rincian Anggaran sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		ALOKASI	PAGU
I	Total Anggaran BKD Kota Mataram sesuai DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah Kota Mataram TA. 2017		112.929.599.909,00
1	Total Anggaran untuk mendukung Program Kegiatan Prioritas sesuai Tabel Keselarasan out put Penganggaran	11.263.494.900,00	
2	Total Anggaran untuk Pengadaan Tanah	83.529.272.679,00	
3	Total Anggaran untuk Kegiatan Penunjang Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	13.528.839.605,00	
4	Total Anggaran untuk Kegiatan Penunjang Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	3.601.537.725,00	
5	Total Anggaran untuk Kegiatan Penunjang Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	274.590.000,00	
6	Total Anggaran untuk Kegiatan Penunjang Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	136.535.000,00	
7	Total Anggaran untuk Kegiatan Penunjang Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	595.330.000,00	
TOTAL		112.929.599.909,00	112.929.599.909,00